

**PERILAKU NELAYAN PRA SEJAHTERA TERHADAP BANTUAN  
MODAL PERAHU WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA**

**(Studi pada Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung  
Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar  
Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DWI APRILIANI**

**NPM 1816011010**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERILAKU NELAYAN PRA SEJAHTERA TERHADAP BANTUAN MODAL PERAHU WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA**

**(Studi pada Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung  
Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar  
Lampung)**

**Oleh**

**DWI APRILIANI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku nelayan terhadap bantuan modal perahu wakaf Aksi Cepat Tanggap dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Perilaku tersebut mencakup 3 indikator, yakni pemanfaatan perahu, perawatan perahu, dan dampak bantuan perahu terhadap pendapatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perahu yang dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan perahu tersebut untuk melaut lebih jauh dan jam kerja yang lebih lama dari sebelumnya. Tanggung jawab nelayan terhadap bantuan modal perahu yang diberikan adalah dengan merawat perahu dan juga tidak menjual atau menyewakan perahu untuk kepentingan komersil lain. Adapun pendapatan keluarga nelayan penerima manfaat bantuan perahu wakaf diketahui belum begitu signifikan. Peningkatan pendapatan itu kurang lebih hanya setengah dari pendapatan sebelumnya. Peningkatan pendapatan nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca yang tidak pasti, keterbutuhan alat pancing yang baik belum terpenuhi, dan harga penjualan hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan pengeluaran.

Kata kunci: perilaku nelayan, bantuan modal perahu wakaf ACT, pendapatan

## **ABSTRACT**

### **BEHAVIOR OF PRE-PROSPERED FISHERMENS TOWARD WAQF BOAT CAPITAL ASSISTANCE OF AKSI CEPAT TANGGAP IN INCREASING FAMILY INCOME**

**(Study in Way Muli Village, Rajabasa District, South Lampung Regency and  
Panjang Selatan Village, Panjang District, Bandar Lampung City)**

**By**

**DWI APRILIANI**

This study aims to determine the behavior of fishermen towards the assistance of the Aksi Cepat Tanggap waqf boat capital in increasing family income. The behavior includes 3 indicators, namely boat utilization, boat maintenance, and impact of boat assistance on income. The approach in this study is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the use of boats by fishermen is to use the boat to go to sea further and work longer hours than before. The fishermen's responsibility for the boat capital assistance provided is to maintain the boat and also not to sell or rent the boat for other commercial purposes. The income of fishing families who are beneficiaries of waqf boat assistance is known to be not so significant. The increase in income was only about half of the previous income. The increase in fishermen's income is influenced by various factors such as uncertain weather, the selling price of caught fish that is not commensurate with expenditure.

Keywords: fisherman behavior, ACT waqf boat capital assistance, income

**PERILAKU NELAYAN PRA SEJAHTERA TERHADAP BANTUAN  
MODAL PERAHU WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA**

**(Studi pada Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung  
Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar  
Lampung)**

**Oleh**

**DWI APRILIANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : PERILAKU NELAYAN PRA SEJAHTERA  
TERHADAP BANTUAN MODAL PERAHU  
WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN  
KELUARGA (Studi pada Desa Way Muli  
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung  
Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan  
Panjang Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Dwi Aprifiani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816011010**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Dra. Anita Damayantie, M.H.**  
NIP. 19690304199403 2 002

2. Ketua Jurusan Sosiologi

**Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**  
NIP. 19770401200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Anita Damyantie, M.H.



Penguji Utama : Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Dwi Apriliani

NPM. 1816011010

## RIWAYAT HIDUP



Dwi Apriliani lahir di Gunung Sugih pada tanggal 24 April 2000. Penulis merupakan anak dari Bapak Suyono dan Ibu Sutami. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Pendidikan formal yang telah ditempuh, yaitu:

1. SD N 3 Gunung Sugih Pasar pada tahun 2006-2012
2. SMP N 1 Gunung Sugih pada tahun 2012-2015
3. SMA N 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015-2018

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Nasional Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Di awal tahun 2021 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Pada bulan Agustus tahun 2021 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung.



## **MOTTO**

Hidup Sekali, Jadilah Berarti.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. atas segala rahmat dan kasih sayang serta kepada Baginda Nabi Muhammad yang telah menunjukkan jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul **“Perilaku Nelayan Pra Sejahtera Terhadap Bantuan Modal Perahu Wakaf Aksi Cepat Tanggap dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi pada Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan motivasi, saran, kritik, masukan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Swt. atas segala karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan sampai dengan tahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Suyono dan Ibu Sutami. Terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan penulis sampai dengan sekarang ini. Terima kasih untuk doa-doa baiknya, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Bapak dan Mami, Aamiin.
3. Terima kasih kepada Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung
5. Kepada Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih karena sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan

memberikan saran serta masukan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan Ibu, Aamiin.

6. Kepada Ibu Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembahas Skripsi penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, dan masukan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan Ibu, Aamiin.
7. Kepada seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Sosiologi yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama proses perkuliahan.
8. Untuk kakakku tersayang Andi Purnomo terima kasih sudah banyak membantu penulis selama ini dan sudah menjadi kakak yang sangat bertanggung jawab di keluarga. Teruntuk saudari kembarku Mba Ana (Dwi Apriliana) *thank you so much* sudah mendedikasikan waktu, tenaga, dan biaya untuk penulis selama ini serta sudah mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
9. Seluruh keluarga besarku, terima kasih sudah mendukung dan mendoakan penulis selama ini. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan kalian semua.
10. Untuk orang-orang baik yang tak hentinya menyemangati dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di kampus, Dina Qolbi Lestari, Izzatul Jannah, Khoirunnisa, Seila Mawarni, Nadia Khumairatun Nisa, Sela Rima Putri, Mira Antika, Ade Rannie, dan Novi Handayani. Terima kasih sudah menerima penulis, menjadi tempat bercerita, *sharing*, diskusi, dan berbagi banyak hal. Semoga silaturahmi kita terus terjaga hingga nanti.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fisip Unila atas ukhuwah yang terjalin hingga sekarang. Terima kasih para Alumni Pimpinan Kabinet Koalisi Qur'ani atas kebersamaan dan kesempatan yang diberikan. Teruntuk Abang, Mba, dan Adik-adik semua terima kasih, kalian luar biasa.
12. Untuk keluarga besar BIROHMAH terima kasih banyak atas pengalaman mengesankan yang diberikan, semoga Allah Swt. mengumpulkan kita semua nanti di Surga-Nya, Aamiin.

13. Untuk pejuang Harmoni 2019 terima kasih sudah menerima penulis dan mendukung selama ini, Salsa, Ayu, Suksesih, Putri, Suci, Adel, Kokom, Tupal, dan teman-teman ikhwan. *Thank you so much* kalian semua keren.
14. Untuk teman-teman seperjuangan Sosiologi 2018 terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu mendukung penulis.
15. Untuk keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U KBM Unila) terima kasih atas segala pengalamannya. Untuk Mba Naura, Mba Dewi, Mba Valen, Mba Atika, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih sudah menerima dan mendukung penulis.
16. Untuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung terima kasih atas saran, masukan, dan pengalamannya selama ini. Terima kasih sudah menerima penulis dan peduli sekali selama proses PKL MBKM sampai dengan sekarang.
17. Untuk seluruh informan terima kasih sudah banyak membantu penulis. Terima kasih atas informasi yang diberikan, semoga skripsi ini bisa menjadi bahan evaluasi yang baik untuk semuanya.
18. Untuk teman-teman KKN Desa Sidokerto, Andhika, Yuda, Irma terima kasih atas kerja samanya. Terima kasih sudah membantu dan menyemangati penulis selama ini.
19. Untuk keluarga besar Perumahan Kampus Hijau Resident Blok E8, Dek Tri, Yaya, Dina, Ana, Fiken, Lutfia, Salis, Aufa, Sherly, Syifa, Deasy, Irma, Sela, Asih, Mba Halfa, Mba Erika, dan Mba Liza terima kasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis dan sudah banyak membantu penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
20. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua orang yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan dukungan yang berarti bagi penulis, yang sudah mendoakan. Semoga semuanya dilancarkan dan diberkahi segala urusannya.

Semoga Allah Swt. membalas kebaikan kalian semua yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

Dwi Apriliani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Kegunaan Penelitian .....	16
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	16
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Tentang Perilaku Nelayan .....	17
2.2 Tinjauan Tentang Aksi Cepat Tanggap .....	17
2.3 Tinjauan Tentang Bantuan Modal Perahu Wakaf .....	19
2.4 Tinjauan Tentang Pendapatan .....	21
2.5 Tinjauan Tentang Keluarga Nelayan Pra Sejahtera.....	23
2.6 Penelitian Terdahulu .....	30
2.7 Landasan Teori .....	32
2.8 Kerangka Berpikir .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian .....	37
3.3 Fokus Penelitian .....	38
3.4 Penentuan Informan.....	39
3.5 Sumber Data.....	41
3.5.1 Sumber Data Primer .....	41
3.5.2 Sumber Data Sekunder .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Observasi.....	42
3.6.2 Wawancara Mendalam .....	43
3.6.3 Dokumentasi .....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	44
3.7.1 Reduksi Data .....	45
3.7.2 Penyajian Data.....	45
3.7.3 Penarikan Kesimpulan .....	46
3.8 Keabsahan Data .....	46
3.8.1 Uji Kredibilitas .....	46

<b>IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1    Gambaran Lokasi Desa Way Muli .....	47
4.1.1    Luas Wilayah dan Batas Administratif .....	47
4.1.2    Akses Menuju Desa Way Muli .....	47
4.1.3    Jumlah Penduduk Desa Way Muli .....	48
4.1.4    Mata Pencaharian Masyarakat .....	49
4.1.5    Sarana Pendidikan .....	50
4.1.6    Sarana Peribadatan .....	50
4.2    Gambaran Lokasi Desa Panjang Selatan .....	51
4.2.1    Akses Menuju Desa Panjang Selatan .....	51
4.2.2    Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	52
4.2.3    Tingkat Pendidikan .....	52
4.2.4    Mata Pencaharian .....	53
4.2.5    Keagamaan .....	54
4.3    Perbedaan Lokasi Penelitian .....	55
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1    Profil Informan .....	56
5.2    Hasil tentang Bantuan Modal Perahu Wakaf Aksi Cepat Tanggap .....	61
5.2.1    Tujuan Pelaksanaan Bantuan Modal Perahu Wakaf .....	61
5.2.2    Alasan Pemberian Bantuan .....	63
5.2.3    Proses Pelaksanaan Bantuan .....	66
5.2.4    Jenis Perahu .....	69
5.3    Hasil tentang Pemanfaatan Bantuan Modal Perahu Wakaf .....	71
5.4    Tanggung Jawab Nelayan terhadap Bantuan Modal Perahu Wakaf .....	76
5.4.1    Status Kepemilikan Perahu .....	76
5.4.2    Peraturan atau Kewajiban Penerima Manfaat .....	79
5.4.3    Perawatan Perahu .....	81
5.4.4    Pendampingan Bantuan Modal Perahu Wakaf ACT .....	83
5.5    Dampak Bantuan Perahu Wakaf terhadap Pendapatan Nelayan .....	85
5.5.4    Peningkatan Pendapatan Nelayan .....	85
5.5.1    Kondisi Nelayan Sebelum Menerima Bantuan Perahu Wakaf .....	88
5.5.2    Penjualan Hasil Tangkapan .....	91
5.5.3    Faktor Penghambat Peningkatan Pendapatan Nelayan .....	93
5.5.5    Pemenuhan Kebutuhan Hidup .....	96
5.6    Pembahasan .....	98
5.6.1    Pemanfaatan Perahu Masih Terus Berjalan atau Dilakukan .....	98
5.6.2    Perawatan Perahu Terkendala Biaya .....	99
5.6.2    Dampak Bantuan Modal Perahu Wakaf ACT Bagi Nelayan .....	100
5.7    Analisis Teori .....	103
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
6.1    Kesimpulan .....	107
6.2    Saran .....	108

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Desa Way Muli .....	48
Tabel 3. Mata Pencaharian Desa Way Muli.....	49
Tabel 4. Sarana Pendidikan Desa Way Muli .....	50
Tabel 5. Sarana Peribadatan Desa Way Muli.....	50
Tabel 6. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Desa Panjang Selatan ....	52
Tabel 7. Data Tingkat Pendidikan Desa Panjang Selatan.....	53
Tabel 8. Mata Pencaharian Desa Panjang Selatan.....	53
Tabel 9. Penduduk Berdasarkan Agama .....	54
Tabel 10. Sarana Peribadatan Desa Panjang Selatan.....	55
Tabel 11. Data Informan Penelitian.....	60
Tabel 12. Tanggapan Mengenai Dampak Bantuan Perahu terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan.....	85



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Gambar Status IPM Menurut Provinsi 2020 .....	6
2. Gambar Bagan Kerangka Pikir.....	36
3. Gambar Jenis Perahu Ketinting .....	69
4. Gambar Wawancara Informan FYD .....	118
5. Gambar Wawancara Informan RLP .....	118
6. Gambar Wawancara Informan AH.....	119
7. Gambar Wawancara Informan B .....	119
8. Gambar Rumpon untuk Mencari Ikan .....	120
9. Gambar Batu untuk Menahan Rumpon dalam Air .....	120
10. Gambar Proses Pembuatan Perahu Wakaf ACT .....	121
11. Gambar Perahu Wakaf ACT Lampung.....	121

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Adapun 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif dan 3,25 juta km<sup>2</sup> merupakan lautan. Sementara wilayah daratan hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup>. Dengan luas lautan yang ada, Indonesia mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan merupakan sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Tahun 2019 ekspor untuk hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 di mana nilai tersebut naik 10,1 % dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, cumi-cumi, tuna, rajungan, gurita dan rumput laut adalah komoditas yang sering dicari (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

Akan tetapi, kekayaan hasil laut Indonesia yang melimpah justru berbanding dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar laut atau daerah pesisir, seperti wilayah atau perkampungan-perkampungan nelayan. Daud dkk., (2018) menjelaskan masyarakat nelayan biasanya tinggal di daerah pedesaan pesisir yang tidak mempunyai fasilitas memadai seperti sekolah atau pasar. Keadaan tersebut menjadikan rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, serta pengetahuan masyarakat. Kemudian, Dimitra dan Yuliasuti (2012) dalam penelitiannya juga menyebutkan jika masyarakat kampung nelayan mempunyai karakteristik dengan latar belakang pendidikan serta kondisi sosial ekonomi yang relatif terbatas.

Siregar (2016) menyatakan bahwa hampir di seluruh perkampungan nelayan terdapat anak-anak usia muda yang sibuk bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di perkampungan nelayan seringkali tidak bersekolah padahal usia mereka seharusnya masih duduk

di bangku sekolah. Para orang tua mengatakan bahwa alasan anak mereka tidak sekolah ialah karena masalah ekonomi sehingga tidak terlalu memikirkan masalah pendidikan anak mereka. Para orang tua umumnya memiliki tingkat pendidikan ditaraf SD. Kondisi tersebut menunjukkan jika masyarakat nelayan belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan untuk kemajuan mereka.

Fenomena kehidupan yang terjadi di perkampungan nelayan menggambarkan kehidupan yang masih mengalami kemiskinan. Menurut Olanda dkk., (2019) kemiskinan yang terjadi di kehidupan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi sekitar tempat tinggal mereka. Kebiasaan atau budaya malas serta pasrah akan kondisi yang ada menjadi suatu bagian atas mentalitas seorang nelayan. Keadaan tersebut secara psikologis menjadikan individu atau nelayan merasa tidak mempunyai motivasi, merasa kurang, serta etos kerja yang kurang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Ditinjau dari sumber penyebab kemiskinan, Ginandjar (dalam Prasiwi dan Harianto, 2018) menyebutkan terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural disebabkan belum seimbangya pembangunan serta belum meratanya hasil pembangunan. Pembangunan yang belum merata dapat menyebabkan pendapatan tidak seimbang dan menimbulkan ketimpangan struktur masyarakat. Lebih lanjut, Suryawati (dalam Cahyawan dan Machdum, 2019) mengemukakan jika kemiskinan struktural dianggap juga sebagai kondisi yang terjadi karena rendahnya akses sumber daya dalam sistem sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan kultural mengacu pada sikap masyarakat yang dipengaruhi kebiasaan hidup ataupun gaya hidup. Masyarakat tersebut tidak tergerak untuk berbenah atau berusaha memperbaiki kondisi kehidupannya sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.

Sementara itu, kemiskinan dikalangan nelayan dapat disebabkan oleh kedua faktor penyebab kemiskinan yakni struktural atau kultural. Penelitian Suleman dkk., (2019) mengenai kemiskinan struktural di Desa Maitara Tidore menjelaskan

bahwa terdapat hubungan *patron-klien* antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Pemilik kapal merupakan *patron* atau pihak yang mempunyai kekuasaan serta modal yang kuat sementara nelayan buruh sebaliknya. Keadaan tersebut menunjukkan kedudukan yang tidak seimbang antara nelayan buruh dan pemilik kapal. Pada saat musim paceklik atau sulit mencari ikan, nelayan buruh biasanya akan berhutang kepada pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterikatan hutang serta jaminan sosial tersebut membuat nelayan buruh memiliki ketergantungan dengan para pemilik modal atau kapal.

Mussadun dan Nurpratiwi (2016) dalam penelitiannya mengenai penyebab kemiskinan nelayan di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang menjelaskan jika masih terdapat struktur sosial tersendiri, yaitu nelayan buruh dan nelayan majikan. Struktur tersebut membuat adanya pembagian hasil antara nelayan buruh dan majikan, yakni sebesar 50%-50% di mana sebelumnya penghasilan dipotong dengan biaya perbekalan yang digunakan selama perjalanan melaut. Misalnya pendapatan Rp 1.000.000 akan dipotong biaya perbelakan terlebih dahulu. Jika perbekalan sebesar Rp 200.000 maka sisa penghasilan menjadi Rp 800.000. Jumlah tersebut kemudian dibagi dua antara majikan dan buruh nelayan. Dalam hal ini, majikan mendapatkan pendapatan Rp 400.000 sementara nelayan buruh mendapatkan Rp 400.000. Akan tetapi, pendapatan nelayan buruh nantinya harus dibagi kembali sesuai dengan jumlah nelayan buruh yang ada.

Lebih lanjut, Mussadun dan Nurpratiwi (2016) menambahkan perbandingan pendapatan juga terjadi antara nelayan kecil dengan para bakul atau pengepul baik yang langganan ataupun bukan. Apabila nelayan sudah berlangganan dengan pengepul tersebut penjualan akan lebih mudah. Dalam hal ini bakul akan lebih diuntungkan karena tidak perlu melaut atau hanya menjual hasil tangkapan serta harga ditentukan oleh bakul. Harga jual hasil tangkapan biasanya akan lebih tinggi dari harga beli bakul terhadap nelayan. Adapun nelayan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga jual karena kualitas hasil tangkapan dapat menurun jika terus dibiarkan sehingga mereka harus cepat menjualnya saat hasil tangkapan masih segar untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Mussadun dan Nurpratiwi (2016) juga menjelaskan jika kemiskinan nelayan dapat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan. Nelayan Tambak Lorok mempunyai kebiasaan belanja saat penghasilan mereka lebih banyak. Barang-barang yang dibeli bukanlah kebutuhan primer melainkan barang mahal seperti emas atau perabot rumah tangga. Emas tersebut dibeli bukan untuk investasi melainkan sebagai pemenuhan keinginan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat sifat boros pada nelayan. Tidak jarang emas tersebut dijual kembali untuk membeli kebutuhan sehari-hari saat pendapatan mereka menurun.

Adapun Hamdani dan Wulandari (2016) mengenai penyebab kemiskinan nelayan tradisional diketahui bahwa penyebab kemiskinan dapat terjadi akibat perilaku konsumtif. Hal ini diawali dari perilaku nelayan kaya yang bergaya hidup konsumtif dengan membeli barang-barang diluar kebutuhan. Kondisi tersebut kemudian mendorong para nelayan kecil untuk melakukan gaya hidup konsumtif padahal penghasilan mereka masih dibawah para nelayan kaya. Perilaku konsumtif tersebut membuat nelayan kecil harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya atau saat membutuhkan biaya besar. Mereka sering meminjam kepada saudara bahkan rentenir. Pinjaman dari rentenir biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga seperti sakit, kecelakaan, hajatan kerabat baik pernikahan, kelahiran, dan kematian. Tain (2013) menambahkan dalam penelitiannya di wilayah Jawa Timur, kemiskinan nelayan tangkap dapat disebabkan oleh perilaku boros. Pendapatan dari melaut banyak dihabiskan hari itu juga atau hanya beberapa hari. Mereka membangun konsep berpikir bahwa masih dapat melaut lagi untuk mendapatkan uang.

Yulianda., dkk (2021) dalam penelitiannya tentang budaya kemiskinan nelayan kecil dan buruh diketahui bahwa pada saat pendapatan mereka meningkat maka pola konsumsi mereka juga meningkat. Bukan hanya untuk kebutuhan pokok melainkan juga pada kebutuhan tersier, seperti membeli televisi, motor, kulkas, dan mentraktir teman-teman. Pembelian barang-barang tersebut tidak dilakukan secara tunai semua, namun terdapat barang-barang yang dibeli secara kredit. Saat

peralihan musim atau masa paceklik, hasil tangkapan mereka menurun dan hal tersebut berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk pembayaran kredit barang. Nelayan yang membeli motor dengan sistem kredit rentan untuk ditarik motornya oleh petugas. Kondisi semakin sulit karena ditambah dengan biaya listrik dan kebutuhan lain sehingga mereka terpaksa berhutang pada tetangga ataupun lembaga keuangan dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Situasi tersebut dapat berjalan panjang sehingga membuat nelayan sulit keluar akibat budaya konsumtif dan gaya hidup yang tidak sesuai.

Faktor kultural dan struktural kemiskinan dikalangan nelayan telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat nelayan. Dalam hal ini, banyak nelayan yang dianggap masih menjalani kehidupan yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, tidak semua nelayan berada atau mengalami kondisi perekonomian yang sulit. Hal ini seperti yang dikemukakan Listiyandra dkk., (2016) bahwa umumnya masyarakat nelayan dianggap sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan masih rendah. Akan tetapi tidak semua nelayan dapat dikatakan dalam garis kemiskinan, artinya terdapat nelayan-nelayan yang tergolong sejahtera seperti nelayan pemilik kapal atau modal yang kuat. Adapun nelayan-nelayan yang pendapatannya masih rendah (tingkat kesejahteraan masih rendah) contohnya ialah nelayan tradisional dan nelayan buruh.

Nelayan tradisional atau nelayan kecil sering kali mendapati hambatan dalam menangkap ikan karena keterbatasan yang mereka miliki seperti perahu, alat tangkap, dan kebutuhan perbekalan. Keadaan tersebut membuat nelayan kecil sulit bersaing dengan pemilik modal besar dalam pemenuhan kebutuhan melaut. Faktor alam juga berpengaruh besar karena para nelayan tidak dapat melaut ketika terjadi badai atau hujan lebat. Para nelayan yang tidak memiliki keterampilan atau bekerja di bidang lain dapat sulit memenuhi kebutuhan keluarga sehingga terpaksa berhutang. Rendahnya pendapatan para nelayan akan memengaruhi pemenuhan

kebutuhan keluarganya. Siklus hidup nelayan yang terus seperti itu menyebabkan kehidupan nelayan erat dengan masalah kemiskinan.

Kemiskinan umumnya dihubungkan dengan rendahnya pendapatan. Akan tetapi, masalah kemiskinan merupakan suatu persoalan yang *complex*. Artinya, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan suatu negara termasuk yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia seperti pembangunan manusia atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pramesti dan Bendesa (2018) menjelaskan bahwa IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari indeks kesehatan, pendidikan, serta daya beli untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia yang akan terlihat dari penduduk sehat dan umur panjang, terampil dan berpendidikan, serta memiliki pendapatan cukup yang menjamin untuk hidup layak.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 1. Status IPM Menurut Provinsi, 2020.

Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung diketahui menjadi satu-satunya di Pulau Sumatera yang berstatus sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ). IPM Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 69,69. Badan Pusat Statistik (2020) menyebutkan jika angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni 69,57. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan laju perkembangan IPM tahun 2020. Kondisi demikian dapat dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan

penurunan konsumsi rumah tangga. Faktor lain yang juga berpengaruh ialah masih adanya pandemi COVID-19 yang dapat menghambat ruang gerak manusia. Keadaan tersebut berpengaruh pada perkembangan dimensi-dimensi pembentukan IPM.

UNDP (*United Nations Development Programme*) menetapkan tiga dimensi dalam pembentukan IPM, yakni pengetahuan, hidup sehat dan umur panjang, serta standar hidup layak. Pertama, dimensi pengetahuan diketahui dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan anak umur 7 tahun, sementara RLS merupakan gambaran jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal. Kedua, dimensi hidup sehat dan umur panjang diketahui dari indikator usia harapan hidup saat lahir. Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) adalah perkiraan rata-rata lamanya waktu (dalam tahun) yang bisa dijalani seseorang selama hidupnya. Perhitungan indeks harapan hidup ditetapkan berdasarkan nilai minimum dan maksimum usia harapan hidup sesuai standar UNDP, yakni 20 tahun nilai minimum dan 85 tahun untuk nilai maksimum. Ketiga, dimensi pemenuhan standar hidup yang layak diketahui dari indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator pengeluaran riil per kapita dapat menggambarkan indikator pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merupakan *output* dari membaiknya perekonomian (BPS, 2020). Dalam hal ini diketahui bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut banyak faktor termasuk pendapatan masyarakat.

Pendapatan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur kemiskinan karena berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan hidup setiap keluarga. Masalah rendahnya pendapatan juga masih dirasakan oleh para nelayan kecil. Munandar dan Darmawan (2020) menjelaskan bahwa tingkat rendahnya pendapatan nelayan diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan hasil tangkapan berkurang, rendahnya mutu produk, kualitas SDM yang rendah dan



sebagainya. Kondisi demikian memicu rendahnya kesejahteraan hidup dikalangan nelayan.

Hermawati (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator kemiskinan atau kesejahteraan yang dikemukakan berbagai pihak. Sajogyo memakai indikator tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita dalam menentukan kemiskinan. Sajogyo membedakan tingkat ekuivalen dari konsumsi beras di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan jumlah ekuivalen beras ditentukan sebesar 360 kg beras per orang per tahun, sementara di wilayah perdesaan jika jumlah konsumsi beras seseorang kurang dari 240 kg per tahun maka ia termasuk dalam golongan sangat miskin. Sementara itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat dari sisi kesejahteraan di mana terdapat beberapa tingkatan kesejahteraan keluarga, yakni tingkat Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus).

Selanjutnya, Hermawati (2017) menambahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar dalam mengetahui angka kemiskinan. Dalam hal ini, BPS tidak menggunakan kebutuhan dasar dari jumlah beras. BPS menggunakan indikator Widyakarya Pangan dan Gizi, yakni dengan 2.100 kalori per orang per hari untuk kebutuhan makanan. Sedangkan kebutuhan non-makanan ialah kebutuhan sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator kemiskinan atau kesejahteraan oleh BKKBN. Hal ini disesuaikan dengan indikator yang digunakan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menentukan para penerima manfaat bantuan di mana ACT menggunakan indikator yang cukup sama dengan BKKBN untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat.

Kehidupan keluarga nelayan seringkali dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang kurang sejahtera atau pra sejahtera. Suyoto (dalam Rosni, 2017) menyatakan keluarga pra sejahtera ialah keluarga yang masih merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti kebutuhan sandang, papan, dan

pangan. BKKBN (2011) menyebutkan keluarga pra sejahtera ialah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga. Enam indikator keluarga sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga, yakni umumnya anggota keluarga makan 2 kali dalam sehari atau lebih; anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian; tempat tinggal atau rumah yang ditempati memiliki lantai, dinding, dan atap yang baik; jika terdapat anggota keluarga yang sakit maka dibawa ke sarana kesehatan; jika pasangan dengan usia subur ingin melakukan KB maka pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga dapat menempuh pendidikan atau bersekolah.

Kondisi keluarga nelayan pra sejahtera dihadapkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga nelayan bergantung pada penghasilan yang diperoleh sehari-hari. Penghasilan para nelayan seringkali tidak menentu. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat memengaruhi penghasilan nelayan contohnya faktor musim atau cuaca serta sarana prasarana seperti perahu, alat tangkap atau jala, dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan beberapa terobosan langkah kebijakan dalam upaya membantu kebutuhan keluarga pra sejahtera.

Program-program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat pra sejahtera terdiri dari dua jenis kebijakan, yakni kebijakan praktis dan kebijakan strategis. Kebijakan praktis dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang implementasinya tidak memakan waktu yang terlalu lama seperti kebijakan strategis, serta dampak yang dirasakan tidak bertahan lama. Contoh daripada kebijakan ini ialah Program Beras Miskin (RASKIN), program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan sebagainya. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai atau kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan akan pangan yang dapat cepat habis atau tidak bertahan lama. Sementara itu, kebijakan strategis ialah kebijakan yang dibuat dengan perencanaan serta tujuan jangka panjang. Proses daripada kebijakan ini akan memakan waktu lebih lama, namun hasil yang diharapkan dapat berjangka panjang. Contoh daripada program ini ialah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM), dan sebagainya. Akan tetapi, langkah atau program-program tersebut belum seluruhnya mampu mengatasi kesejahteraan keluarga pra sejahtera. Artinya, terdapat program yang berhasil sesuai tujuan yang diharapkan serta program yang belum berhasil atau masih mengalami kendala.

Kiswanto (2021) dalam penelitiannya melakukan survei pada delapan provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian tersebut mencari tahu mengenai tingkat kepuasan masyarakat dan implementasi program BPNT. Diketahui bahwa di setiap kota seluruh keluarga PKH sudah mencairkan bantuan. Akan tetapi, di sebagian kota untuk keluarga Non-PKH belum mencairkan bantuan, yakni Kota Mataram, Bandar Lampung, dan Medan. Beberapa alasan mereka belum mencairkan bantuan ialah belum mendapatkan waktu atau jadwal pencairan bantuan. Selain itu, beberapa belum mendapatkan program (15,5 persen) atau belum mendapatkan kartu BPNT sehingga belum dapat mencairkan bantuan karena pencairan menggunakan kartu BPNT.

Sementara itu, berdasarkan tingkat kepuasan program BPNT, Kiswanto (2021) menyebutkan bahwa Kota Probolinggo memiliki angka tertinggi yakni 88,6%. Selanjutnya diikuti Kota Mataram 87,1%, Malang 78,6%, dan Surakarta 75,7%. Adapun tingkat kepuasan paling rendah ialah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Kota Bandar Lampung, yakni sebesar 48,6%. Kemudian diikuti Kota Medan 27,1%, Jakarta Utara 12,7%, dan Tasikmalaya sebesar 8,6%. Alasan dominan yang merupakan penyebab ketidakpuasan akan program BPNT ialah kualitas bahan pangan yang kurang sesuai dengan harga. Selanjutnya, dipicu oleh jadwal transfer bantuan yang ternyata belum banyak diketahui penerima manfaat, terbatasnya jenis barang yang dapat dibeli karena telah ditentukan sebelumnya, serta besarnya bantuan Rp110.000/bulan yang dinilai masih kurang.

Harefa (2015) meneliti mengenai tantangan serta masalah implementasi program KUR di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Melalui penelitian tersebut, diketahui bahwa implementasi program KUR masih menghadapi tantangan di

kedua provinsi. Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdapat usaha-usaha yang layak mendapatkan KUR, namun belum memperoleh fasilitas kredit tersebut. Hal ini mengindikasikan jika proses sosialisasi program kepada pelaku usaha yang masih kurang. Selain itu, keterlambatan pembayaran klaim atau gagal bayar oleh lembaga penjamin menjadi penilaian yang kurang baik dari otoritas pengawas perbankan atas jumlah kredit yang telah disalurkan. Kondisi ini umumnya terjadi di wilayah Indonesia Timur di mana lembaga penjamin terkendala jarak yang jauh sehingga verifikasi menghabiskan waktu cukup lama. Masalah lain ialah sulitnya bank penyalur dalam melakukan penagihan terhadap para pelaku usaha kecil yang gagal bayar karena alamat yang dicantumkan diawal pengajuan kredit tidak sesuai. Akan tetapi, diluar masalah-masalah tersebut diketahui bahwa dalam penelitian ini jumlah KUR yang disalurkan oleh bank-bank BUMN mengalami peningkatan yang signifikan.

Penelitian Sofianto (2020) mengenai implementasi program PKH di Povinsi Jawa Tengah diketahui bahwa secara umum dari aspek prosedur dan manajerial telah mendapat respon positif. 81,30% responden menyatakan pengelolaan sudah baik, 74,65% menyatakan kemudahan program, dan 71,72% menyatakan adanya manfaat nyata dari PKH. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program PKH di Provinsi Jawa Tengah masih mengalami beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian sasaran program di mana masih terdapat orang mampu yang mendapatkan bantuan begitupun sebaliknya. Beberapa penyebab masalah tersebut ialah belum validnya data, proses yang masih *top down*, dan pemutakhiran data di desa yang mengalami berbagai persoalan sosial, politik, dan pendanaan. Selain itu, bantuan PKH telah memberikan dampak positif di bidang pendidikan dan kesehatan, namun belum berkontribusi secara langsung di bidang ekonomi atau kesejahteraan. Menurut sisi manajerial, belum ada kontribusi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam mengalokasikan dana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendamping program atau mendanai masyarakat miskin yang tidak terdaftar program PKH.

Hasil penelitian tersebut cukup selaras dengan penelitian Najidah dan Lestari (2019) mengenai kebijakan program PKH di Kelurahan Rowosari Kota Semarang. Mereka menjelaskan bahwa program PKH di Kelurahan Rowosari belum sepenuhnya efektif. Tidak ada koordinasi yang baik dalam pengelolaan data sasaran PKH baik oleh Dinas Sosial Kota Semarang, Kementerian Sosial Kota Semarang, Unit Pelaksana, dan pejabat setempat. Selain itu, belum ada rencana yang matang untuk mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kemandirian.

Hasil yang cukup berbeda ditunjukkan dari penelitian Infatih dkk., (2018) tentang efektivitas program PKH di Desa Sumber Kejayan Kabupaten Jember. Diketahui dari aspek *input* dan proses PKH telah dinilai efektif, artinya telah tepat sasaran dan prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial. Sementara itu, dari aspek *output* bidang kesehatan PKH dinilai belum efektif. Diketahui dari 8 kriteria, terdapat 2 kriteria responden yang memiliki anak usia 0-11 bulan yang tidak sesuai dengan presentase yang diharapkan, yakni kurangnya frekuensi ibu dalam memeriksakan kesehatan pada masa nifas dan kurangnya frekuensi pemeriksaan bayi 0-1 bulan di fasilitas kesehatan. Selain itu, belum efektifnya pola makan anak usia 1-5 tahun dalam kesehariannya juga memengaruhi indikator *output* PKH. Selanjutnya Utami dkk., (2021) mengenai kinerja pendamping PKH di Kota Bandar Lampung menunjukkan jika secara keseluruhan berada di tingkat sedang. Hal ini berarti kinerja pendamping secara keseluruhan telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Namun, masih dijumpai pendamping yang belum menyampaikan keseluruhan materi mengenai P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dan tidak memantau kehadiran KPM PKH pada komponen yang mereka akses.

Penelitian Natalia dkk., (2012) mengenai implementasi program PNPM Mandiri di Desa Sumberejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur menunjukkan jika program ini telah berjalan baik terhadap perkembangan usaha kecil. Efektivitas program PNPM terlihat dari perubahan sosial dan ekonomi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang lebih baik serta meningkatnya usaha KSM. Adapun program ini juga dinilai cukup efisien dilihat dari pengembalian modal pinjaman yang dapat

dilakukan lebih cepat yakni 11,5 bulan dari waktu yang sudah ditentukan, yakni 1 tahun. Hal ini didukung juga dengan partisipasi masyarakat yang cukup baik. Namun, program PNPM dalam pelaksanaannya juga mengalami hambatan-hambatan yang menjadikan pelaksanaan program tersebut tidak maksimal. Hambatan-hambatan tersebut seperti KSM yang menunggak, pinjaman modal tidak digunakan untuk usaha, anggota KSM pindah atau meninggal dunia, pembentukan KSM yang tidak merata, serta kurangnya intensitas fasilitator program dalam mengawasi dan membina masyarakat secara langsung.

Akmel (2018) dalam penelitiannya mengenai efektivitas program Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa program raskin belum berjalan efektif. Hal itu dikarenakan program tersebut belum memenuhi indikator 6T ketepatan raskin. Berdasarkan indikator 6T, yakni tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi, diketahui bahwa pelaksanaan program raskin di Kecamatan Sukarame hanya memenuhi 2 indikator yakni indikator tepat administrasi dan tepat jumlah. Penelitian serupa dilakukan Ekafitri (2014) mengenai efisiensi dan efektivitas distribusi raskin di Provinsi Lampung. Hasil penelitiannya menunjukkan jika pendistribusian raskin pada sentra penduduk miskin di Provinsi Lampung cukup efektif dan efisien. Program tersebut berjalan searah dengan ketepatan indikator pendistribusian serta singkatnya alur distribusi. Namun, pelaksanaan program ini masih mengalami kendala seperti ketidakjujuran, kurangnya komunikasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian penerima raskin dan komunikasi yang kurang antara penerima bantuan dan penyelenggara sehingga masyarakat kurang memahami ketentuan penerima raskin.

Kebijakan ataupun program-program pemerintah yang telah berjalan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dan kendala yang menghambat keberhasilan program secara maksimal. Hal tersebut kemudian mendorong banyak pihak untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial contohnya lembaga-lembaga atau organisasi seperti Palang Merah

Indonesia (PMI), Forum Peduli Bangsa, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan lain sebagainya. Adapun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap khususnya ACT Cabang Bandar Lampung.

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Aksi Cepat Tanggap berupaya untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Mulai dari tahun 2012 ACT telah bertransformasi menjadi suatu lembaga kemanusiaan global, dengan aktivitas yang memiliki jangkauan lebih luas. Pada skala lokal Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengembangkan jaringannya ke semua provinsi baik dalam bentuk wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk kantor cabang ACT. Jangkauan dari aktivitas program saat ini sudah mencapai ke 30 provinsi dan juga 100 kota/kabupaten di seluruh Indonesia (Lestari, 2020).

Alasan peneliti memilih ACT ialah karena ACT sendiri merupakan lembaga yang cukup aktif dan sudah berdiri cukup lama terhitung dari tahun 2005 sampai sekarang sehingga cakupan programnya telah mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ACT merupakan lembaga yang berfokus pada permasalahan sosial atau kemanusiaan di mana ACT juga berfokus pada masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat kecil seperti keluarga nelayan pra sejahtera. Rendahnya penghasilan para nelayan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi fokus ACT.

Rendahnya penghasilan nelayan pra sejahtera merupakan masalah sosial yang penting untuk segera diselesaikan. Penghasilan yang tidak cukup atau kurang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup yang terhambat. Yayasan Aksi Cepat Tanggap dalam hal ini berupaya membantu penghasilan keluarga nelayan pra sejahtera melalui bantuan modal perahu wakaf. Adapun ACT cabang Bandar Lampung merupakan salah satu cabang Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang telah menerapkan program tersebut. Program perahu wakaf ACT Lampung telah

terrealisasi di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Desa Way Muli merupakan daerah yang terdampak tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 lalu sehingga terdapat nelayan yang kehilangan perahu dan pekerjaan. Sementara itu, Desa Panjang Selatan merupakan daerah yang juga terdapat keluarga nelayan pra sejahtera serta tidak memiliki perahu atau merupakan nelayan kecil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perilaku nelayan pra sejahtera terhadap bantuan modal perahu wakaf ACT. Adapun judul penelitian ini yaitu Perilaku Nelayan Pra Sejahtera Terhadap Bantuan Modal Perahu Wakaf Aksi Cepat Tanggap dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perilaku nelayan pra sejahtera terhadap bantuan modal perahu wakaf ACT?
- 1.2.2 Bagaimana dampak bantuan modal perahu wakaf ACT terhadap pendapatan keluarga nelayan pra sejahtera?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana perilaku nelayan pra sejahtera terhadap bantuan modal perahu wakaf ACT dan dampak bantuan tersebut dalam meningkatkan pendapatan keluarga.



## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi terkait dengan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengetahuan terkait dengan bantuan modal perahu wakaf Yayasan Aksi Cepat Tanggap.
- b. Memberikan pengetahuan terkait bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan pra sejatera.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Tentang Perilaku Nelayan**

Notoadmojo (dalam Fhadila, 2017) menerangkan perilaku ialah suatu aktivitas atau kegiatan dari manusia itu sendiri. Lake dkk., (2017) menyatakan jika perilaku adalah reaksi individu atas rangsangan atau stimulus yang berpengaruh terhadap diri seseorang baik luar ataupun dalam. Menurut Kwick (dalam Fadhila, 2017) perilaku merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat diamati dan dipelajari dari suatu organisme. Adapun nelayan merupakan kelompok masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil laut baik melalui penangkapan ataupun budi daya (Ikhwanul dkk., 2014). Jadi, perilaku nelayan ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan nelayan akibat suatu stimulus yang diterima sehingga berpengaruh pada aktivitasnya sehari-hari.

Perilaku nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tindakan nelayan terhadap bantuan modal perahu wakaf ACT. Nelayan dalam hal ini ialah nelayan kecil atau nelayan buruh. Melalui bantuan modal perahu yang diberikan harapannya dapat meningkatkan produktivitas nelayan dalam menangkap ikan serta pendapatan mereka dapat meningkat. Perilaku nelayan dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, yakni pemanfaatan bantuan perahu, tanggung jawab dalam merawat perahu, dan dampak bantuan terhadap pendapatan.

### **2.2 Tinjauan Tentang Aksi Cepat Tanggap**

Yayasan Aksi Cepat Tanggap adalah sebuah lembaga yang bergerak pada bidang sosial kemanusiaan. ACT diresmikan secara hukum pada tanggal 21 April 2005 sebagai yayasan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan. Dalam

mengembangkan aktivitasnya, ACT melakukan kegiatan tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta program-program berbasis spiritual seperti Zakat, Qurban, dan Wakaf. Program yang dijalankan tidak lagi berkisar hanya pada bencana alam, namun telah berkembang ke berbagai aspek seperti bencana kemanusiaan atau bencana sosial seperti rawan pangan, gizi buruk, kesehatan, lingkungan, pendidikan, pembangunan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, bahkan konflik sosial (Putri, 2020).

Yayasan Aksi Cepat Tanggap didukung oleh para donatur publik yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Selain itu juga terdapat partisipasi perusahaan melalui program kemitraan atau CSR. Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya, Aksi Cepat Tanggap dengan rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada para donatur ataupun pemangku kepentingan lainnya serta mempublikasikan melalui media massa (Irfan dkk., 2021).

Pada tahun 2012 ACT merubah dirinya menjadi lembaga kemanusiaan internasional dengan capaian aktivitas yang lebih luas. Ditaraf lokal, Aksi Cepat Tanggap juga meluaskan jaringan ke semua provinsi di Indonesia dalam bentuk jaringan kerelawanan MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) serta melalui jaringan kantor cabang ACT. Adapun cakupan aktivitas programnya sudah sampai ke 30 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pada skala internasional, ACT memperluas jaringannya dalam bentuk *representative person* hingga menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Cakupan program tingkat global telah sampai ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Indocina, Afrika serta Eropa Timur. Wilayah kerja ACT dalam skala global diawali dengan aksi disetiap tragedi kemanusiaan diberbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kehausan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas.

Melalui kolaborasi kemanusiaan, ACT menyeru kepada lembaga kemanusiaan dan semua elemen masyarakat untuk ikut terlibat bersama. Dengan pengalaman

belasan tahun bergerak di bidang kemanusiaan, ACT melakukan edukasi bersama dan membuka jaringan kemitraan global. Seluruh program ACT menjadi sarana dalam merajut kemitraan berbagai pihak seperti lembaga amil zakat, publik figur, komunitas peduli, dan pihak-pihak lain dengan visi yang sama untuk kemanusiaan.

### **2.3 Tinjauan Tentang Bantuan Modal Perahu Wakaf**

Menurut KBBI (2016) bantuan merupakan barang yang dipakai untuk membantu atau suatu pertolongan. Umar (dalam Hendra, 2019) menjelaskan modal adalah faktor produksi yang berpengaruh kuat untuk menghasilkan produktivitas, secara makro modal adalah pendorong investasi baik dalam prasarana produksi maupun saat proses produksi sehingga mendorong peningkatan produktivitas. Prakoso (2013) menambahkan modal ialah salah satu faktor produksi yang menunjang hasil produksi di mana peningkatan hasil produksi dapat terjadi karena salah satunya penggunaan alat produksi yang efisien. Adapun perahu merupakan kendaraan di air (biasanya tidak bergeladak) kemudian lancip di kedua ujungnya dan lebar di tengahnya (KBBI, 2016). Secara bahasa wakaf artinya “habs” atau menahan (Khosyi’ah, 2010). Ali (dalam Khosyi’ah, 2010) menjelaskan bahwa wakaf ialah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai ajaran islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menerangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka bantuan modal perahu wakaf merupakan bantuan modal dalam bentuk perahu yang diberikan kepada para nelayan yang bertujuan meningkatkan produktivitas atau pendapatan nelayan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Rahmawati (2019) menyebutkan terdapat dua jenis benda wakaf, meliputi:

a. Benda Tidak Bergerak

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (2) benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yakni sebagai berikut:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun belum.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- 3) Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas tanah satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Benda Bergerak

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3), benda bergerak merupakan benda yang tidak akan habis dikonsumsi. Benda bergerak dalam hal ini, yaitu:

- 1) Uang.
- 2) Logam mulia.
- 3) Surat Berharga.
- 4) Kendaraan.
- 5) Hak atas kekayaan intelektual.
- 6) Hak sewa.
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perahu wakaf dalam penelitian ini termasuk dalam wakaf benda bergerak. Hal ini dikarenakan perahu merupakan salah satu kendaraan di mana digunakan oleh para nelayan untuk melaut atau mencari ikan.

Bantuan modal perahu wakaf merupakan bantuan yang diberikan ACT kepada para nelayan pra sejahtera dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan mereka. Perahu merupakan sarana vital yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup para nelayan. Untuk itu, bantuan modal perahu

dilaksanakan agar para nelayan khususnya nelayan-nelayan kecil atau buruh yang belum mempunyai modal kuat atau sarana memadai seperti perahu dapat terus melaut untuk menghidupi keluarganya.

## **2.4 Tinjauan Tentang Pendapatan**

Rindawati (2021) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan jumlah jasa maupun barang untuk memenuhi tingkat hidup masyarakat di mana dengan pendapatan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertiwi (2015) menyebutkan pendapatan ialah seluruh penghasilan yang dihitung dalam jangka waktu tertentu yang didapat seseorang baik dari sektor formal atau nonformal. Sementara menurut Nazir (dalam Pertiwi, 2015) pendapatan adalah hasil yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jadi, pendapatan merupakan hasil yang diperoleh seseorang atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu atas usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indrianawati dan Soesatyo (2015) menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator tingkat pendapatan, yakni sebagai berikut:

1) **Pendapatan Sangat Tinggi**

Pendapatan sangat tinggi merupakan pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan;

2) **Pendapatan Tinggi**

Pendapatan tinggi merupakan pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – Rp. 3.500.000,00 per bulan;

3) **Pendapatan Sedang**

Pendapatan sedang merupakan pendapatan rata-rata antara Rp 1.500.000,00 – Rp. 2.500.000,00 per bulan;

4) **Pendapatan Rendah**

Pendapatan rendah merupakan pendapatan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000,00 per bulan.

Menurut Salim (dalam Indara dkk., 2017) faktor faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan adalah sebagai berikut:

1) Faktor modal

Modal merupakan aset manusia untuk bertahan hidup dengan baik. Adapun modal tersebut yakni modal ekonomi, modal sosial, modal fisik, dan modal sumber daya alam.

2) Faktor tenaga kerja

Faktor tenaga kerja umumnya merupakan faktor yang dicurahkan sebagai usaha nelayan atau keluarga. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan usaha nelayan untuk menangkap ikan. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja yang khusus dibayar setiap turun melaut sesuai produksi yang dihasilkan.

3) Faktor jarak tempuh melaut

Faktor ini mengacu pada tiga pola penangkapan ikan yakni sebagai berikut.

a. Pola penangkapan lebih dari satu hari

Pola ini adalah pola penangkapan ikan lepas pantai di mana jauh atau dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu yang dipakai menentukan lamanya melaut.

b. Pola penangkapan satu hari

Para nelayan biasanya melaut sekitar pukul 14.00 kemudian mendarat kembali sekitar pukul 09.00 di hari berikutnya. Penangkapan ikan dengan pola ini juga biasanya termasuk dalam penangkapan ikan lepas pantai.

c. Pola penangkapan tengah hari

Penangkapan ikan dengan pola ini dilakukan di dekat pantai. Umumnya nelayan berangkat sekitar pukul 03.00 atau setelah subuh dan mendarat pagi harinya sekitar pukul 09.00. Apabila daerah tangkapan ikan dilakukan di lokasi yang lebih jauh dari daerah sasaran maka hasil tangkapan yang diperoleh atau diproduksi dapat lebih banyak serta mendatangkan pendapatan lebih besar.

#### 4) Faktor pengalaman

Pengalaman dapat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan. Semakin lama seorang nelayan mempunyai pengalaman melaut maka semakin besar harapan hasil dari tangkapan ikan yang didapatkan.

Pendapatan pada penelitian ini ialah pendapatan yang diperoleh nelayan pra sejahtera dari hasil melaut. Sementara pendapatan yang didapat diluar sektor nelayan tidak termasuk. Pendapatan nelayan pada penelitian ini mengacu pada waktu sebelum dan sesudah adanya bantuan modal perahu wakaf ACT. Apabila pendapatan nelayan meningkat setelah adanya bantuan perahu wakaf maka bantuan tersebut dapat dikatakan berdampak pada pendapatan nelayan.

### **2.5 Tinjauan Tentang Keluarga Nelayan Pra Sejahtera**

Susilowati (2006) mengemukakan bahwa keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau keluarga inti/batih. Sebuah keluarga pada umumnya terdiri dari orang-orang yang saling berhubungan darah atau perkawinan meski tidak selalu. Ikhwanul dkk., (2014) menambahkan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, perkawinan, adopsi ataupun tinggal bersama. Berdasarkan pemaparan tersebut maka keluarga dapat diartikan sebagai kelompok dalam masyarakat yang terikat dengan hubungan darah atau perkawinan seperti ayah, ibu, suami istri, adik, kakak, dan sebagainya.

Keluarga pra sejahtera adalah sebuah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar atau pokok secara minimal seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan serta kesehatan (Anwar dkk., 2016). Menurut BKKBN tahun 2011 keluarga pra sejahtera ialah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud keluarga pra sejahtera ialah keluarga yang masih kekurangan secara ekonomi sehingga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.



BKKBN tahun 2011 membagi tahapan keluarga menjadi lima tahapan, yakni sebagai berikut.

a) Tahap Keluarga Pra Sejahtera

Ialah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga.

b) Tahap Keluarga Sejahtera I (KS I)

Ialah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, namun tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis. Enam indikator keluarga sejahtera I (KS I) adalah sebagai berikut.

1) Umumnya anggota keluarga makan 2 kali dalam sehari atau lebih.

Makan dalam hal ini diartikan dengan kebiasaan makan keluarga sehari-hari seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi, makan sugu dan lain sebagainya.

2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pakaian yang berbeda ialah kepemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang. Misalnya pakaian untuk di rumah berbeda dengan pakaian yang dipakai saat bekerja atau berbeda dengan pakaian untuk bepergian seperti menghadiri undangan pernikahan dan sebagainya.

3) Tempat tinggal atau rumah yang ditempati memiliki lantai, dinding, dan atap yang baik.

Artinya lantai, dinding, dan atap rumah dalam keadaan layak untuk ditempati baik dari sisi kesehatan ataupun perlindungan.

4) Jika terdapat anggota keluarga yang sakit maka dibawa ke sarana kesehatan.

Dalam hal ini, sarana kesehatan yang dimaksud ialah sarana kesehatan modern seperti rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Posyandu, Apotek, Bidan dan lain sebagainya. Sarana kesehatan tersebut sudah memiliki akses obat-obatan yang diproduksi dengan pengawasan dokter

atau pihak yang berwenang seperti Departemen Kesehatan/ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- 5) Jika pasangan dengan usia subur ingin melakukan KB maka pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Sarana pelayanan kontrasepsi ialah tempat atau sarana yang memberikan pelayanan untuk KB seperti rumah sakit, Puskesmas, Bidan Desa, Poliklinik dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut sudah dapat memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern seperti Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Implan, Kondom, suntikan dan pil kepada para pasangan usia subur yang membutuhkan.

- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga dapat menempuh pendidikan atau bersekolah.

Hal ini berlaku bagi keluarga yang memiliki anak usia 7-15 tahun dimana harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan dengan anak usia 7-15 tahun dalam keluarga tersebut aktif dan bersekolah baik di tingkat SD atau SLTP.

c) Tahap Keluarga Sejahtera II (KS II)

Ialah keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I dan 8 indikator KS II, namun tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga. Delapan indikator keluarga sejahtera II (KS II) adalah sebagai berikut.

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Kegiatan keluarga dalam menjalankan ibadah yakni dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Ibadah tersebut dapat dilakukan seorang diri atau bersama dengan anggota keluarga di rumah maupun ditempat ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaan masing-masing keluarga.

2. Setiap anggota keluarga mendapatkan paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun.

Pakaian baru yang dimaksud ialah pakaian layak pakai (baru/bekas) sebagai tambahan atas pakaian yang telah dimiliki. Pakaian tersebut merupakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya.

3. Paling kurang dalam satu kali seminggu, seluruh anggota keluarga mengkonsumsi daging/ telur/ ikan.

Telur, daging, atau ikan tersebut dikonsumsi sebagai pelengkap dalam upaya pemenuhan gizi atau protein. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang menerapkan vegetarian.

4. Pada tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kondisi sehat yang dimaksudkan ialah setiap anggota keluarga dalam keadaan batas normal. Artinya tidak harus dirawat di rumah sakit, tidak harus terpaksa tinggal di rumah, serta tidak harus absen bekerja atau sekolah dalam kurun waktu lebih dari 4 hari. Artinya setiap anggota keluarga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

5. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.

Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> maksudnya yaitu seluruh luas lantai rumah baik tingkat atas maupun bawah. Termasuk dapur, kamar mandi, garasi, gudang dan lainnya yang jika dibagi dengan jumlah penghuni rumah luas ruang tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup>.

6. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin.

Anggota keluarga dengan rentang usia 10-60 tahun dapat membaca tulisan huruf latin serta memahami arti kalimatnya. Akan tetapi, indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

7. Terdapat seseorang atau lebih dalam keluarga yang bekerja untuk mendapat penghasilan.

Paling tidak salah seorang anggota keluarga yang telah dewasa memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan yang dirasa layak oleh

masyarakat. Pendapatan tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga sehari-hari.

8. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan obat atau alat kontrasepsi.

Keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur (suami-isteri) dengan dua anak atau lebih dapat ikut program KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern seperti pil, suntik, Implan, Kondom, MOW dan MOP.

d) Tahap Keluarga Sejahtera III (KS III)

Ialah keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, namun tidak memenuhi salah satu dari indikator keluarga sejahtera III Plus atau indikator aktualisasi diri keluarga. Lima indikator keluarga sejahtera III ialah sebagai berikut.

1. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk barang atau uang. Sebagian penghasilan yang diperoleh suatu keluarga disisihkan untuk kemudian ditabung. Tabungan dapat berupa uang atau barang seperti hewan ternak, tanah, sawah, rumah sewaan, perhiasan, dan sebagainya. Tabungan yang berupa barang tersebut, jika dirupiahkan atau diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-
2. Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Artinya, masing-masing anggota keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuannya. Contohnya ialah dengan mendengarkan tausiah atau pengajian, mendatangkan guru mengaji untuk anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragam islam dan sebagainya.
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling tidak seminggu sekali dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Pengertian keluarga terbiasa makan bersama ialah seluruh anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk makan bersama. Adapun waktu sebelum dan sesudah makan dapat dipergunakan untuk saling berkomunikasi membahas persoalan yang sedang dihadapi dalam satu minggu terakhir ataupun musyawarah antar anggota keluarga.

4. Keluarga mendapat informasi dari majalah/ surat kabar/ radio/ televisi/ internet.

Anggota keluarga mempunyai akses informasi baik lokal, regional, nasional bahkan internasional melalui media cetak atau elektronik. Media massa tersebut tidak hanya digunakan untuk keluarga yang bersangkutan. Namun dapat digunakan oleh orang lain diluar pihak keluarga tersebut.

5. Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini berarti keikutsertaan anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan atau sosial seperti ronda malam, gotong royong, arisan, kegiatan PKK, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya.

e) Tahap Keluarga Sejahtera III Plus

Ialah keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, dan 2 indikator KS III Plus. Indikator keluarga sejahtera III plus (KS III Plus) adalah sebagai berikut.

1. Keluarga sukarela memberikan sumbangan materiil dalam kegiatan sosial secara teratur.

Artinya ialah keluarga tersebut mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dengan memberikan sumbangan materiil secara sukarela. Sumbangan diberikan dalam kurun waktu tertentu (secara teratur) baik berupa barang maupun uang bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini tidak termasuk dengan sumbangan wajib.

2. Terdapat anggota keluarga yang aktif dalam perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat.

Anggota keluarga yang aktif dalam perkumpulan sosial berarti bahwa keluarga tersebut mempunyai rasa sosial yang tinggi dengan memberikan bantuan baik pikiran, tenaga, dan moral secara terus-menerus demi kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan anggota keluarga sebagai pengurus organisasi ataupun kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Sayogya (dalam Susilowati, 2006) mengemukakan bahwa rumah tangga nelayan merupakan contoh daripada keluarga pra sejahtera dimasyarakat. Rumah tangga nelayan diketahui sebagai keluarga yang tergolong miskin selain rumah tangga petani atau buruh tani serta pengrajin. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, nelayan diartikan sebagai warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil laut baik melalui penangkapan ataupun budidaya (Ikhwanul dkk., 2014). Jadi, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya bergantung dengan hasil laut.

Pada umumnya masyarakat nelayan yang sering dijumpai merupakan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan tersebut biasanya hanya bermodalkan sebuah perahu, dayung, dan alat untuk menangkap ikan yang masih tradisional. Tidak jarang juga terdapat nelayan yang hidupnya berpindah-pindah menyesuaikan dengan populasi ikan. Apabila populasi ikan menurun maka mereka bermigrasi ketempat lain.

Charles (dalam Ikhwanul dkk., 2014) membagi nelayan menjadi empat bagian atau kelompok yakni:

- a. Nelayan subsisten (*subsistence fisher*), ialah merupakan nelayan yang bekerja atau menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhannya pribadi.
- b. Nelayan asli (*indigenous/native/aboriginal fisher*), ialah merupakan nelayan yang kurang lebih mempunyai ciri atau karakter yang sama dengan kelompok nelayan subsisten. Akan tetapi, mereka mempunyai hak untuk melakukan kegiatan komersial meskipun dalam skala yang sangat kecil.
- c. Nelayan kreasi (*recreational/sport fisher*), ialah merupakan mereka yang menangkap ikan hanya untuk kesenangan atau untuk berolahraga, dan
- d. Nelayan komersial (*commercial fisher*), ialah merupakan mereka yang melakukan penangkapan ikan ditujukan untuk dipasarkan atau komersial baik pasar domestik ataupun ekspor.

Pada penelitian ini, keluarga nelayan pra sejahtera yang dimaksud mengacu pada indikator keluarga pra sejahtera oleh BKKBN yakni yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga. Nelayan dalam hal ini yaitu mereka yang berprofesi sebagai nelayan dalam kehidupan sehari-hari serta masih berpenghasilan rendah. Pendapatan yang masih kurang tersebut menyebabkan mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan baik.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yakni penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu

<b>No.</b>	1
<b>Penulis/ Tahun</b>	Habibah, Nanik Rahmawati, dan Rahma Safitri (2021)
<b>Judul</b>	Sikap Nelayan Terhadap Bantuan Alat Tangkap di Desa Kelarik Utara Kabupaten Natuna
<b>Metode</b>	Kualitatif
<b>Hasil</b>	Terdapat 3 macam sikap nelayan atas bantuan alat tangkap yang diberikan oleh pemerintah di Desa Kelarik Utara. Pertama, sikap positif di mana para nelayan menggunakan atau memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Kedua, sikap negatif, yaitu menunjukkan bahwa nelayan tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Ketiga, sikap netral. Sikap netral dalam hal ini ialah sikap yang ditunjukkan oleh nelayan yang belum dan atau tidak pernah mendapatkan bantuan. Adapun faktor-faktor pendorong atas sikap nelayan yaitu pendidikan, pengalaman orang lain, kebudayaan, dan emosi.
<b>Perbedaan</b>	Dalam penelitian Habibah, Nanik, dan Rahma bantuan diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah sementara pada penelitian ini oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap.
<b>No.</b>	2
<b>Penulis/ Tahun</b>	Linda Permatasari, Pudjo Suharso, dan Wiwin Hartanto (2020)

<b>Judul</b>	Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember
<b>Metode</b>	Kualitatif
<b>Hasil</b>	Dinas Perikanan Jember telah mengimplementasikan program BPAN pada masyarakat pesisir pantai Puger Kabupaten Jember melalui beberapa tahapan. Tahapan dimulai dengan sosialisasi, pendataan, verifikasi, validasi, pengusulan, penetapan, pengajuan, dan pembayaran klaim. Namun, dalam pelaksanaannya program ini mengalami beberapa masalah seperti sosialisasi yang masih kurang kepada nelayan, minimnya petugas dinas, serta hampir 80% nelayan belum terdata program KUSUKA dan BPAN. Beragam masalah tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti informasi yang kurang jelas dan menyeluruh serta pengetahuan nelayan yang masih kurang. Adapun faktor-faktor yang mendorong program tersebut diantaranya sumber daya yang tersedia, struktur birokrasi, sosialisasi kepada nelayan, serta komitmen implementator yang baik.
<b>Perbedaan</b>	Perbedaan penelitian ialah pada jenis bantuan yang diberikan dan pihak yang terlibat di mana penelitian Linda, Pudjo, dan Wiwin bantuan yang diberikan adalah bantuan premi asuransi dan melibatkan Dinas Perikanan Jember. Sementara, pada penelitian ini bantuan yang diberikan berupa bantuan modal perahu wakaf.
<b>No.</b>	3
<b>Penulis/ Tahun</b>	Ayu Mentari Suryadi dan Sufi (2019)
<b>Judul</b>	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)
<b>Metode</b>	Kualitatif
<b>Hasil</b>	Strategi pemerintah dalam penelitian ini ialah memberikan <i>boat</i> dan alat tangkap dan sosialisasi mengenai penggunaan alat tangkap. Akan tetapi, strategi yang dilakukan mengalami kendala karena kurangnya fasilitas bantuan yang diberikan, sumber daya manusia, dan pengawasan para nelayan sehingga bantuan tidak efisien dan kurang merata. Hambatan eksternalnya ialah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat memanfaatkan bantuan.
<b>Perbedaan</b>	Penelitian Ayu dan Sufi berfokus pada jenis bantuan peralatan serta hambatan internal dan eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara penelitian ini berfokus pada perilaku nelayan terhadap bantuan modal perahu wakaf dan dampaknya terhadap pendapatan nelayan.



<b>No.</b>	4
<b>Penulis/ Tahun</b>	I Ketut Arnawa, I B Purnama, dan Gede Mekse Korri Arisena (2016)
<b>Judul</b>	Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
<b>Metode</b>	Kuantitatif
<b>Hasil</b>	Hasil penelitian menunjukkan jika bantuan sarana perikanan tangkap yang diberikan telah meningkatkan pendapatan nelayan 2,6287%. Adapun rata-rata pendapatan nelayan penerima bantuan Rp 6.469.736,20/bulan, sementara nelayan yang tidak menerima bantuan memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 6.304.018,60 /bulan. Dalam penelitian ini faktor yang berpengaruh sekali dalam peningkatan pendapatan nelayan ialah jumlah biaya yang dikeluarkan saat melaut dan jenis perahu yang dipakai.
<b>Perbedaan</b>	Arnawa, Purnama, dan Arisena dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, bantuan yang diberikan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan. Sementara pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta melalui Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

*Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2022*

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yakni membahas persoalan nelayan. Adapun pada penelitian ini, peneliti mengambil kasus berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada perilaku nelayan terhadap bantuan perahu wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung serta dampak bantuan tersebut dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

## 2.7 Landasan Teori

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Ritzer dan Goodman (2017) Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar. Pertama adalah rasionalitas sarana-tujuan (instrumental) atau tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain.

Harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Lalu yang kedua adalah rasionalitas nilai atau tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis estetis, religius, atau bentuk perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan afektual ditentukan oleh kondisi emosi. Terakhir, tindakan tradisional ditentukan oleh cara bertindak yang biasa dan telah lazim dilakukan. Harus dicatat bahwa meskipun Weber membedakan empat bentuk tindakan ideal-tipikal, dia sepenuhnya sadar bahwa tindakan tertentu biasanya terdiri dari kombinasi dari keempat tipe tindakan ideal tersebut. Selain itu, Weber berargumen bahwa sosiolog harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami tindakan yang lebih memiliki variasi rasional ketimbang memahami tindakan yang didominasi oleh perasaan atau tradisi.

Penelitian ini mengacu pada tindakan sosial nelayan pra sejahtera. Berdasarkan empat tipe tindakan yang dikemukakan Max Weber maka apabila dikaitkan dengan tindakan nelayan akan dapat diketahui beberapa tipe tindakan. Keempat tipe tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tindakan rasionalitas instrumental

Tipe tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan akal yang rasional berdasarkan sarana-tujuan. Sarana di sini dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Alat tersebut dalam hal ini adalah bantuan perahu yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Melalui tindakan rasionalitas instrumental maka dengan pertimbangan rasio/akal yang rasional bantuan modal perahu wakaf tersebut harapannya dapat meningkatkan pendapatan nelayan dari sebelumnya. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor perilaku nelayan selaku penerima manfaat bantuan perahu. Perilaku nelayan dalam meningkatkan pendapatannya dapat digambarkan dengan perilaku nelayan yang rajin, semangat, pantang menyerah, tepat waktu, dan lain sebagainya.

## 2) Tindakan rasionalitas nilai

Tindakan ini dilakukan atas dasar keyakinan akan suatu nilai. Nilai dalam hal ini dapat berupa nilai agama/religius. Hal itu digambarkan dengan adanya keyakinan dalam diri para nelayan akan anugerah Tuhan atas usaha atau kerja keras mereka. Keyakinan tersebut dapat terlihat dari perilaku atau tindakan mereka dalam bekerja/ berusaha. Mengenai konteks usaha dalam islam, maka dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Berdasarkan ayat tersebut maka diketahui bahwa dalam islam bekerja merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Swt. Di dalam islam, bekerja juga tidak hanya berarti mencari uang atau materi tetapi lebih dari itu. Bekerja merupakan kegiatan yang mulia dimana dengan bekerja atau berusaha seseorang juga dapat menjalankan perintah Allah Swt. yang lain seperti infak, wakaf, zakat, dan sedekah. Dalam hal ini, bantuan modal perahu wakaf juga mengusung konsep sedekah untuk membiasakan para nelayan ini tidak terbiasa dengan sifat meminta sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."

## 3) Tindakan afektif

Tindakan afektif dilakukan dengan pertimbangan emosi dan mengarah pada tindakan spontanitas oleh pelaku tindakan. Tindakan ini dapat digambarkan dengan perilaku nelayan dalam aktivitasnya sehari-hari. Perilaku tersebut berlangsung spontan atas dorongan emosi mereka pada saat itu. Contohnya, aktivitas dipagi hari. Saat bangun tidur dipagi hari apakah langsung bekerja atau justru melakukan aktivitas lain seperti minum kopi, menonton TV, olahraga, atau lainnya. Melalui emosi yang positif akan memunculkan tindakan spontan yang positif yang berguna dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

#### 4) Tindakan tradisional

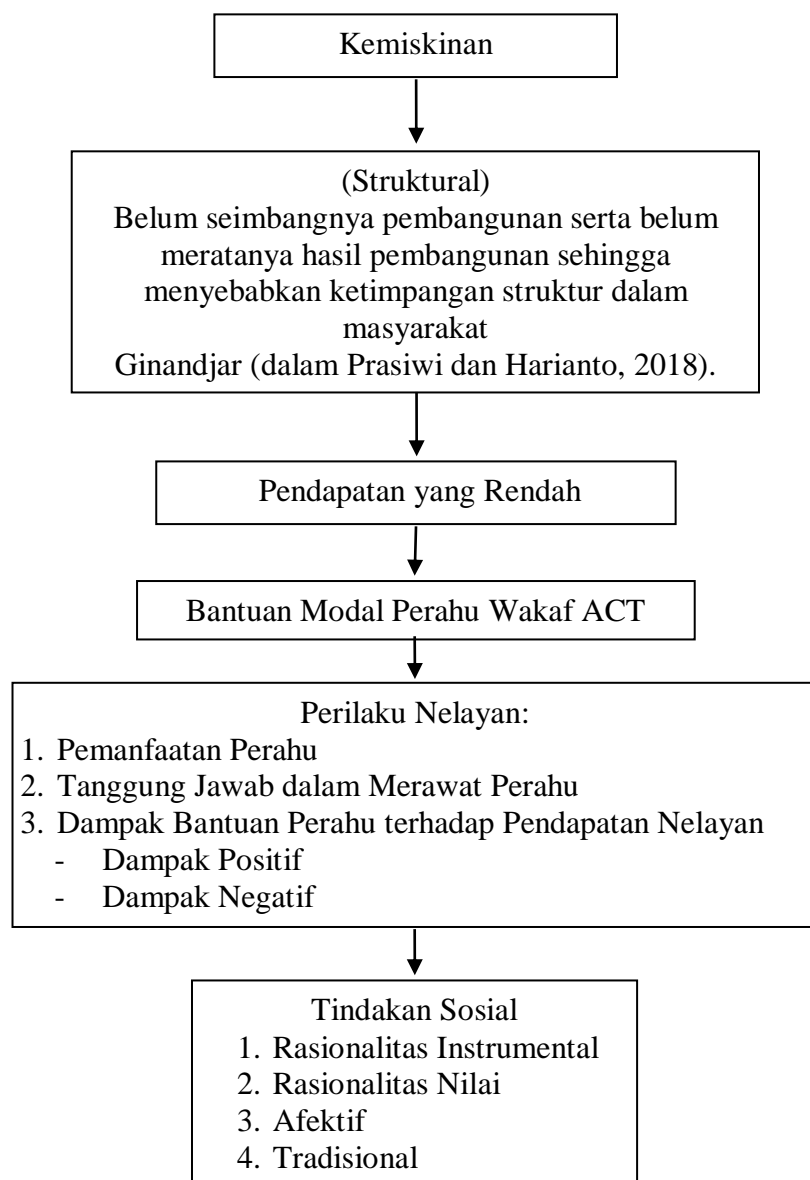
Tindakan tradisional menunjukkan tindakan yang telah lazim dilakukan atau merupakan kebiasaan yang dilakukan para nelayan. Tindakan ini tentunya berkaitan dengan aktivitas nelayan sehari-hari yang biasa mereka lakukan. Kebiasaan tersebut dapat berupa kebiasaan bangun pagi hari, merawat perahu, memeriksa perahu sebelum digunakan melaut, serta melihat kondisi awan atau cuaca sebelum melaut.

### **2.8 Kerangka Berpikir**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sudah terjadi sejak lama. Kemiskinan juga terjadi dikalangan nelayan di mana dirasakan oleh para nelayan kecil atau nelayan buruh. Kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor yakni faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural dapat disebabkan oleh kebiasaan atau gaya hidup nelayan. Adapun faktor struktural dapat terjadi akibat adanya ketimpangan struktur dalam masyarakat. Adapun pada penelitian ini, kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor struktural di mana adanya ketimpangan struktur dalam kehidupan nelayan. Kemiskinan tersebut akan berpengaruh pada pendapatan nelayan di mana pendapatan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk membantu kehidupan nelayan melalui beberapa program seperti PKH, Raskin, BPNT, PNPM, KUR, dan lain sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya program-program tersebut belum sepenuhnya berhasil sesuai tujuan yang diharapkan karena adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Belum maksimalnya program-program pemerintah dalam pelaksanaannya kemudian mendorong munculnya lembaga-lembaga atau organisasi yang bergerak untuk membantu masyarakat. Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan lembaga yang turut hadir untuk membantu permasalahan sosial. ACT berupaya membantu nelayan kecil dengan memberikan bantuan modal perahu wakaf. Bantuan modal

perahu yang diberikan harapannya dapat berdampak baik terhadap perilaku nelayan di mana nelayan dapat memanfaatkan dengan baik bantuan yang diberikan serta meningkatkan pendapatan mereka. Perilaku tersebut digambarkan oleh empat tipe tindakan sosial Max Weber yaitu, tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Berikut merupakan bagan kerangka pikir dengan topik perilaku nelayan terhadap bantuan modal perahu wakaf Aksi Cepat Tanggap dalam meningkatkan pendapatan keluarga.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan & Biklen (dalam Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung pada sumber data, serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif di mana data yang terkumpul lebih berbentuk gambar atau kata-kata. Lebih lanjut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan secara intensif dan peneliti ikut berpartisipasi di lapangan kemudian mencatat dengan hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen, serta membuat laporan penelitian secara mendetail. Hasil penelitian mendeskripsikan atau mengkonstruksikan hasil wawancara terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perilaku nelayan terhadap bantuan perahu wakaf Aksi Cepat Tanggap Lampung dan dampak bantuan tersebut pada pendapatan keluarga nelayan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Pada kedua lokasi tersebut terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan terdapat keluarga yang termasuk dalam keluarga pra sejahtera. Hal ini selaras dengan pendapat Sayogya (dalam Susilowati 2006) yang mengemukakan bahwa rumah tangga nelayan merupakan contoh daripada keluarga pra sejahtera dimasyarakat. Rumah tangga nelayan diketahui sebagai keluarga yang tergolong miskin selain rumah tangga buruh tani serta pengrajin. Selain itu, Desa Panjang

Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan merupakan lokasi atau tempat implementasi bantuan modal perahu wakaf oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kedua lokasi tersebut karena dianggap sesuai dengan topik penelitian.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang perilaku nelayan atas bantuan perahu wakaf ACT Lampung dalam menunjang pendapatan keluarga mereka. Perilaku nelayan dalam hal ini mencakup tiga indikator yakni, pemanfaatan bantuan modal perahu wakaf, tanggung jawab dalam merawat perahu, dan dampak bantuan terhadap pendapatan nelayan. Pemanfaatan bantuan modal perahu wakaf menjadi indikator perilaku nelayan karena dengan bantuan yang diberikan nelayan harapannya dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Kemudian, tanggung jawab dalam merawat perahu menjadi indikator karena merupakan bagian dari perilaku nelayan yakni bagaimana cara nelayan bertanggungjawab atas bantuan yang diberikan sehingga perahu tersebut dapat terus digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sementara itu, dampak bantuan perahu terhadap pendapatan nelayan menjadi salah satu indikator perilaku karena pendapatan merupakan persoalan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dampak bantuan perahu dalam hal ini terbagi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terlihat dari pendapatan nelayan yang meningkat dari sebelum adanya bantuan perahu dan dampak negatif terlihat dari tidak adanya peningkatan atau jumlah peningkatan yang tidak begitu besar. Pendapatan juga dapat diketahui dari status keluarga nelayan, apakah meningkat dari pra sejahtera menjadi sejahtera atau justru tidak ada peningkatan.

### 3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini didasarkan pada subyek yang memiliki data, menguasai permasalahan, dan bersedia untuk memberikan informasi yang lengkap. Adapun pada penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2019) teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sumber data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu di sini ialah informan dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang permasalahan penelitian. Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) FYD (Kepala Cabang ACT Bandar Lampung)

FYD selaku Kepala Cabang ACT Bandar Lampung mempunyai kewenangan dalam hal memutuskan atau menyetujui setiap program yang akan dijalankan oleh tim program ACT termasuk bantuan modal perahu wakaf. Saudara FYD juga merupakan pihak yang nantinya akan berkordinasi langsung dengan pihak ACT pusat terkait implementasi program yang akan berjalan maupun yang sudah berjalan.

2) RLP (*Head of Program* ACT Bandar Lampung)

Sebagai Ketua Program ACT, saudari RLP mempunyai kewenangan dalam merencanakan dan menentukan suatu program ACT sesuai dengan persoalan atau permasalahan sosial yang ada seperti bantuan modal perahu wakaf. Dalam hal ini saudari RLP juga merupakan pihak implementator bersama tim program lainnya yang turun langsung ke lokasi implementasi program serta terlibat dari awal pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan program.

3) DM (Tim Program ACT Bandar Lampung)

DM merupakan tim program ACT dan mempunyai kewenangan dalam membantu ketua program ACT dalam proses implementasi bantuan modal perahu wakaf di lokasi khususnya di Desa Panjang Selatan. DM juga merupakan informan untuk ACT di lokasi implementasi bantuan perahu. Saudari DM merupakan warga yang tinggal di Desa Panjang Selatan dan terlibat dalam proses pelaksanaan bantuan modal perahu wakaf sampai dengan sekarang. Saudari DM ditunjuk sebagai tim program untuk mengawasi



keberjalanan bantuan modal perahu wakaf di Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

4) IY (Tim Program ACT Bandar Lampung)

Sebagai tim program, IY mempunyai kewenangan untuk membantu RLP dalam proses implementasi bantuan modal perahu wakaf khususnya di Desa Way Muli. Selain itu, IY juga merupakan informan sekaligus relawan yang bertugas mengawasi kondisi perahu dan nelayan dalam hal pemanfaatan sekaligus perawatan perahu.

5) B (nelayan)

Saudara B merupakan nelayan yang tinggal di Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sekaligus penerima manfaat bantuan modal perahu wakaf.

6) Ar (nelayan)

Saudara Ar adalah seorang nelayan dan merupakan salah satu penerima manfaat bantuan modal perahu wakaf yang ada di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.

7) At (nelayan)

Saudara At merupakan nelayan penerima manfaat bantuan modal perahu wakaf ACT yang berada di Desa Way Muli.

8) AH (Keluarga Nelayan)

AH merupakan pihak keluarga yang peneliti jadikan salah satu informan. AH merupakan anak dari Saudara B yang juga turut membantu Saudara B merawat perahu dan membantu mengatur pengeluaran untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

9) S (Keluarga Nelayan)

S merupakan pihak keluarga nelayan yang peneliti jadikan informan. S adalah istri dari Saudara At dan mempunyai kewenangan dalam keluarga mereka untuk mengatur masalah pengeluaran termasuk kebutuhan makan, sekolah anak, dan sebagainya. Hal tersebut kemudian peneliti jadikan pertimbangan karena S dianggap mengetahui persoalan pendapatan keluarga nelayan.

#### 10) MAW (Pihak *vendor*)

Selaku pihak *vendor*, dalam hal ini mempunyai wewenang dalam pembuatan perahu. Saudara MAW ditunjuk oleh tim ACT untuk membuat perahu termasuk membeli dan menyiapkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat perahu.

### **3.5 Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sebagai berikut.

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan atau narasumber melalui wawancara dan observasi yang dilakukan pada pihak ACT dan para penerima manfaat perahu wakaf. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada seluruh informan serta observasi di sekitar lokasi penelitian.

#### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, atau karya ilmiah yang telah ada dan dipublikasikan sebelumnya. Karya ilmiah tersebut menjadi bahan referensi yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang dapat dikatakan paling utama dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan daripada penelitian ialah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

### 3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2019) obyek penelitian yang akan diobservasi pada penelitian kualitatif disebut dengan situasi sosial yang mencakup tiga aspek yakni tempat, pelaku, dan aktivitas. Data dari observasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk mendalami serta mengkaji data lebih dalam. Apabila terdapat kekurangan data maka peneliti dapat menanyakan dan memperjelas kembali pada proses wawancara.

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Dalam proses observasi, peneliti mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.

Kedua lokasi penelitian berada di sekitar perkampungan nelayan. Dari pengamatan peneliti, diketahui kondisi rumah-rumah di Desa Way Muli sudah cukup baik, tidak terlihat rumah apung di sekitar pinggir laut. Akan tetapi, rumah-rumah di sana berada sangat dekat dengan laut sekitar 100-200 meter dari laut sehingga cukup rawan bencana ketika terjadi gelombang laut atau tsunami. Selain itu, Desa Way Muli dapat dikatakan cukup rindang karena masih terdapat banyak pohon di sekitar rumah warga. Adapun jalan utama menuju Desa Way Muli sudah cukup baik, di sepanjang jalan peneliti melewati laut dan sawah/perkebunan. Udara di sana juga cukup sejuk. Para korban tsunami yang rumahnya hancur saat ini telah beralih tinggal di hunian tetap yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, Desa Panjang Selatan terdiri dari banyak perusahaan atau pabrik. Adapun keluarga nelayan tidak sebanyak seperti di Desa Way Muli. Hal ini dijelaskan pada Bab IV atau Bab Gambaran Lokasi Penelitian. Untuk menuju lokasi penelitian, peneliti harus melewati gang-gang kecil di wilayah perkampungan nelayan sehingga tidak dapat dilewati dengan menggunakan mobil. Selain itu, masih terdapat rumah-rumah apung dipinggir laut. Rumah-

rumah tersebut terbuat dari kayu dan berdiri di atas air termasuk rumah salah satu informan yakni Saudara B yang merupakan nelayan di sana.

Peneliti juga mengamati perahu yang digunakan nelayan di kedua lokasi. Terlihat masih ada nelayan kecil di kedua lokasi yang masih menggunakan perahu dayung atau sampan. Adapun bantuan modal perahu wakaf yang diberikan ACT kepada para nelayan ini berukuran 5 meter dan 7 meter disertai atap dibagian atasnya. Perahu ukuran 5 meter dapat menampung kurang lebih 3-5 orang penumpang. Sedangkan yang berukuran 7 meter dapat menampung sekitar 5-7 orang penumpang. Perahu tersebut termasuk jenis perahu ketinting dengan warna dominasi hijau dan orange. Peneliti juga melihat perlengkapan yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Nelayan-nelayan ini masih menggunakan perlengkapan sederhana seperti *kotrekan* atau alat pancing senar yang digulung dengan bambu. Selain itu, terdapat batu besar yang mereka gunakan untuk menahan rumpon-rumpon di laut. Rumpon tersebut juga terdiri dari dedaunan atau batang pohon yang sengaja diambil untuk digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian ikan atau berkumpulnya ikan-ikan di laut nantinya.

### **3.6.2 Wawancara Mendalam**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam. Esterberg (dalam Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dalam rangka bertukar ide atau informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara mendalam peneliti dapat menggali informasi lebih dalam kepada informan terkait dengan permasalahan yang diteliti di mana hal ini tidak dapat ditemukan saat proses observasi.

Adapun pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang diwawancarai ialah Kepala Cabang ACT Bandar Lampung, ketua program, tim program, pihak *vendor*, dan keluarga nelayan pra sejahtera sebagai penerima manfaat program perahu wakaf. Wawancara dilakukan di lokasi yang berbeda-

beda yakni, Kantor ACT Bandar Lampung, Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.

Kepala Cabang ACT Bandar Lampung, Ketua Program ACT, dan Tim Program merupakan pihak yang peneliti wawancarai terkait bantuan modal perahu wakaf. Mereka merupakan pihak yang dianggap mengetahui dan memahami terkait bantuan modal perahu wakaf, baik dari proses awal hingga akhir, perawatan, pemanfaatan, dan pengawasan yang sudah dilakukan sampai dengan sekarang.

Adapun nelayan dalam hal ini adalah penerima manfaat bantuan modal perahu wakaf ACT. Mereka dianggap sebagai informan kunci yang harus peneliti wawancarai untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana pemanfaatan, perawatan, dan dampak bantuan perahu itu terhadap pendapatan mereka. Sedangkan pihak keluarga nelayan juga peneliti wawancarai untuk mencari tahu informasi lebih jauh atas informasi yang diberikan oleh para nelayan terutama masalah pendapatan yang merupakan persoalan penting dalam keluarga nelayan. Peneliti juga mewawancarai pihak *vendor* selaku pembuat perahu untuk mencari tahu informasi mengenai jenis perahu dan proses pembuatan perahu.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, karya dan sebagainya (Sugiyono, 2019). Jadi, metode dokumentasi merupakan dokumen yang berisi berbagai peristiwa pada waktu tertentu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dokumentasi pada penelitian ini diantaranya ialah data mengenai profil Desa Way Muli dan Desa Panjang Selatan, data mengenai penerima manfaat bantuan modal perahu wakaf ACT Bandar Lampung, dan sebagainya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Bogdan (dalam Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan

lapangan, wawancara, dan bahan lainnya sehingga menjadi mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **3.7.1 Reduksi data**

Semakin lama peneliti di lapangan, maka akan semakin banyak data yang dikumpulkan serta akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting untuk kemudian dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya atau mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, proses reduksi data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul. Peneliti kemudian memilah data tersebut berdasarkan indikator-indikator yang telah dibuat sebelumnya untuk memudahkan langkah selanjutnya.

### **3.7.2 Penyajian data (*data display*)**

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart*, dan lain sejenisnya. Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2019) menyatakan jika yang paling sering dipakai dalam penyajian data penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dari masing-masing indikator yang telah disusun sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam hasil penelitian sesuai dengan kategori atau pembahasan. Misalnya data mengenai pemanfaatan perahu yang telah dipilah dan dipilih dalam proses reduksi kemudian disajikan oleh peneliti dalam hasil penelitian. Setelah data disajikan maka dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3.7.3 Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sehingga dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan telah didukung dengan data atau bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses reduksi dan penyajian data untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan didapat setelah peneliti membaca dan memahami persoalan masing-masing indikator yang disajikan dalam hasil penelitian. Setelah peneliti memahami hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan.

### 3.8 Keabsahan Data

Agar data pada penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini ialah menggunakan uji *credibility*. Uji kredibilitas dalam penelitian ini meliputi:

#### a) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber serta berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan observasi setelah dilakukannya wawancara untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan pengecekan data dari beberapa narasumber lalu dilakukan pengkategorian atas informasi yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan untuk dipertanyakan kembali pada informan.

## **IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Lokasi Desa Way Muli**

#### **4.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administratif**

Desa Way Muli berada dalam wilayah Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Desa Way Muli mempunyai luas 378 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Rajabasa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Teluk Lampung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaraja
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Way Muli Timur

#### **4.1.2 Akses Menuju Desa Way Muli**

Perjalanan menuju Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dapat ditempuh selama  $\pm 2$  jam dari Kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Peneliti berangkat dari Bundaran Raden Intan Bandar Lampung kemudian melalui Jl. Lintas Sumatera atau Jl. Soekarno Hatta menuju ke arah Panjang melewati Wisata Pantai Pasir Putih sampai dengan wilayah Tarahan. Mengikuti arah Jl. Lintas Sumatera kemudian berjalan terus melewati PT Domus Jaya, Kalianda Rest Area, hingga BULOG Kalianda Lampung Selatan. Selanjutnya,  $\pm 200$  meter setelah melewati Samsat Kota Kalianda peneliti beralih ke Jl. Kusuma Bangsa melewati Tugu Bundaran Kota Kalianda menuju SMA 1 Kalianda. Berjalan terus di Jl. Kusuma Bangsa ke arah Jl. Serma Ibnu Hasyim dan menuju Jl. Pesisir. Jl. Pesisir adalah jalan utama menuju Desa Way Muli. Melewati jalan ini peneliti disuguhkan dengan pemandangan laut yang begitu indah di sepanjang jalan.



Di perjalanan menuju lokasi, peneliti melewati pantai seperti Pantai Tanjung Gading, Pantai Canti, Pantai Wartawan, dan lain sebagainya. Peneliti juga melewati Padang Rumput Desa Sukaraja yang tampak sejuk dengan hijau pepohonan dan rumput yang memenuhi kawasan itu. Menuju Desa Way Muli, peneliti juga melihat pegunungan-pegunungan dengan awan yang tampak mengitari sekitarnya. Di kiri jalan terhampar persawahan dan perkebunan sementara di kanan jalan tampak laut yang terhampar di sepanjang jalan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Way Muli merupakan petani dan nelayan.

#### 4.1.3 Jumlah Penduduk Desa Way Muli

Desa Way Muli mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.596 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	66	47	113
2.	5-9 tahun	110	92	202
3.	10-14 tahun	125	95	220
4.	15-19 tahun	112	107	219
5.	20-24 tahun	129	109	238
6.	25-29 tahun	123	97	220
7.	30-34 tahun	99	71	170
8.	35-39 tahun	102	90	192
9.	40-44 tahun	118	118	236
10.	45-49 tahun	97	84	181
11.	50-54 tahun	84	89	173
12.	55-59 tahun	66	75	141
13.	60-64 tahun	66	59	125
14.	65-69 tahun	44	40	84
15.	70-74 tahun	19	25	44
16.	75 tahun ke atas	11	27	38
<b>Total</b>		<b>1.371</b>	<b>1.225</b>	<b>2.596</b>

Sumber: Profil Desa Way Muli, 2021

Tabel 2 menjelaskan jumlah penduduk Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Way Muli berjumlah 2.596 jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki ialah 1.371 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.225 jiwa. Hal ini menunjukkan jika di Desa Way Muli penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Selain itu, jumlah penduduk dengan usia produktif (antara 15-64 tahun) diketahui berjumlah 1.895 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) berjumlah 701 jiwa. Kondisi ini menunjukkan dominasi penduduk usia muda atau terjadinya bonus demografi di Desa Way Muli di mana jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif (antara 15-64 tahun).

#### 4.1.4 Mata Pencaharian Masyarakat

Desa Way Muli merupakan desa pertanian dan perikanan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Mata Pencaharian Desa Way Muli

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	365 KK
2.	Nelayan	247 KK
3.	Buruh	109 KK
4.	TNI/POLRI	1 KK
<b>Total</b>		<b>722 KK</b>

*Sumber: Profil Desa Way Muli, 2021*

Dari data di atas diketahui jika terdapat beberapa jenis mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Way Muli yaitu petani, nelayan, buruh dan TNI/POLRI. Petani merupakan pekerjaan yang paling banyak dijalani oleh masyarakat Desa Way Muli dengan jumlah 365 KK. Selanjutnya diikuti oleh nelayan dengan 247 KK dan buruh 109 KK. Sementara TNI/POLRI menjadi pekerjaan dengan jumlah paling rendah yakni hanya 1 KK.

#### 4.1.5 Sarana Pendidikan

Kondisi sarana pendidikan Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sarana Pendidikan Desa Way Muli

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	2
3.	SMP/MTS	-
4.	SMA/MA	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Sumber: *Profil Desa Way Muli, 2021*

Data di atas menjelaskan bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Desa Way Muli ialah TK, SD, dan SMA. Desa Way Muli belum mempunyai sarana pendidikan SMP/MTS. SD menempati posisi sarana paling banyak yakni 2 sekolah. Sementara TK dan SMA masing-masing berjumlah 1.

#### 4.1.6 Sarana Peribadatan

Kondisi sarana peribadatan Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana Peribadahan Desa Way Muli

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Mushola	1
2.	Masjid	2
3.	Gereja	-
4.	Pura	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Sumber: *Profil Desa Way Muli, 2021*

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada Desa Way Muli terdapat 4 jenis sarana peribadatan yang terdiri dari 1 mushola, 2 masjid, dan 1 pura. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Way Muli merupakan beragama islam.

## 4.2 Gambaran Lokasi Desa Panjang Selatan

Desa Panjang Selatan memiliki luas wilayah 111 Ha dan berada di wilayah Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Adapun keadaan sosial penduduk dapat digambarkan sebagai berikut.

### 4.2.1 Akses Menuju Desa Panjang Selatan

Perjalanan menuju lokasi penelitian yakni Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dapat ditempuh dengan kurun waktu  $\pm 30$  menit dari Kampus Universitas Lampung dan sekitarnya. Perjalanan menuju lokasi dapat melalui dua rute yang berbeda yakni melalui Jl. ZA. Pagar Alam atau melalui Jl. Lintas Sumatera. Pertama, dari Kampus Unila melalui Jl. ZA. Pagar Alam melewati *flyover* Kedaton (Mall Boemi Kedaton) sampai dengan Jl. Teuku Umar menuju Tugu Adipura. Dari Tugu Adipura, peneliti lalu berbelok ke kiri di Jl. Jend. Sudirman melewati Hotel Batiqa kemudian terus berjalan ke arah Jl. Gatot Subroto melewati Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung. Tetap di Jl. Gatot Subroto melewati Novotel Hotel Lampung terus mengikuti jalan utama sampai menemukan pertigaan di Jl. Yos Sudarso. Kemudian berbelok ke kiri di Jl. Yos Sudarso ke arah Panjang.

Kemudian sampai di daerah Way Lunik, peneliti melewati banyak sekali perusahaan atau pabrik seperti CV. Bumi Waras dan lain-lain. Tetap di Jl. Yos Sudarso kemudian sampai di pertigaan Jl. Selat Malaka III berbelok ke kanan mengikuti Jl. Selat Malaka III melewati Gg. Selat Sunda I, Gg. Selat Sunda II, Gg. Selat Sunda III, sampai di Gg. Selat Sunda IV peneliti berbelok memasuki kawasan Gg. Selat Sunda IV menuju lokasi penelitian.

Adapun rute kedua melalui Jl. Lintas Sumatera kemudian melewati *Flyover* Untung Suropati mengikuti jalan utama ke arah Panjang. Di perjalanan peneliti melewati banyak pabrik atau perusahaan. Lalu setelah di wilayah Panjang, dari Jl. Lintas Sumatera berbelok ke Jl. Teluk Semangka II. Sekitar  $\pm 20$  meter berbelok ke kanan mengikuti Jl. Yos Sudarso kemudian  $\pm 5$  meter dari Jl. Yos Sudarso berbelok ke kiri di Jl. Selat Malaka III masuk ke arah Gg. Selat Sunda IV menuju lokasi penelitian.

Berdasarkan dua jalur tersebut, peneliti dapat menyimpulkan jika rute termudah menuju Desa Panjang Selatan ialah melalui Jl. Lintas Sumatera. Hal ini dikarenakan jalan tersebut langsung mengarah ke daerah Panjang sehingga peneliti tidak perlu bingung menentukan arah jalan yang harus dilalui.

#### 4.2.2 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Desa Panjang Selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 12.127 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	520	509	1.029
2.	5-6 tahun	152	195	374
3.	7-13 tahun	1.272	1.306	2.578
4.	14-16 tahun	891	928	1.819
5.	17-24 tahun	1.560	1.600	3.160
6.	25-54 tahun	1.507	1.468	2.975
7.	55 tahun ke atas	100	119	219
<b>Total</b>		<b>6.002</b>	<b>6.125</b>	<b>12.127</b>

*Sumber: Profil Desa Panjang Selatan, 2021*

Tabel diatas menjelaskan jumlah penduduk Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terbagi dua, yakni laki-laki 6.002 jiwa dan perempuan 6.125 jiwa. Jadi, penduduk Desa Panjang Selatan lebih banyak diisi oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

#### 4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Panjang Selatan dimulai dari yang tidak sekolah sampai tingkat pendidikan sarjana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Data Tingkat Pendidikan Desa Panjang Selatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Sarjana	528
2.	SMA/SLTA	2.535
3.	SMP/SLTP	3.008
4.	SD	4.575
5.	TK	371
6.	Belum Sekolah	1.105
7.	Tidak Sekolah	5
<b>Total</b>		<b>12.127</b>

Sumber: Profil Desa Panjang Selatan, 2021

Tabel 7 menunjukkan jika penduduk Desa Panjang Selatan paling banyak berada ditingkat pendidikan taraf SD dengan jumlah penduduk 4.575 jiwa. Sementara penduduk yang tidak sekolah berjumlah 5 orang. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Panjang Selatan telah mengenyam pendidikan sekolah hingga sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Panjang Selatan cukup baik dalam memahami pentingnya pendidikan.

#### 4.2.4 Mata Pencaharian

Tabel 8. Mata Pencaharian Desa Panjang Selatan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Pegawai Negeri Sipil	415
2.	ABRI	60
3.	Pedagang	1.460
4.	Petani	87
5.	Tukang	1.063
6.	Buruh	5.433
7.	Nelayan	205
8.	Pensiunan	513
9.	Lain-Lain	2.951
<b>Total</b>		<b>12.127</b>

Sumber: Profil Desa Panjang Selatan, 2021

Dari tabel 8, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Panjang Selatan yaitu PNS, ABRI, pedagang, petani, tukang, buruh, nelayan, pensiunan, dan lainnya. Buruh merupakan pekerjaan yang paling banyak dijalani oleh masyarakat Desa Panjang Selatan dengan jumlah 5.433 jiwa. Sementara ABRI menjadi pekerjaan dengan jumlah paling sedikit yakni hanya 60 jiwa.

#### 4.2.5 Keagamaan

Agama berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia serta mengarahkan manusia pada kebaikan. Berdasarkan komposisi penduduk Desa Panjang Selatan, mayoritas masyarakat Desa Panjang Selatan beragama islam. Berikut ini diuraikan data penduduk berdasarkan agama:

Tabel 9. Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	10.844
2.	Kristen Protestan	653
3.	Kristen Katholik	302
4.	Budha	258
5.	Hindu	70
<b>Total</b>		<b>12.127</b>

*Sumber: Profil Desa Panjang Selatan, 2021*

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Panjang Selatan terdiri dari penduduk dengan beberapa macam agama yakni islam, protestan, katholik, budha, dan hindu. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penduduk Desa Panjang Selatan sebagian besar beragama islam yakni berjumlah 10.844 jiwa. Sementara agama hindu menjadi agama yang paling sedikit dianut masyarakat dengan jumlah penganut 70 jiwa.

Tabel 10. Sarana Peribadatan Desa Panjang Selatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Mushola	17
2.	Masjid	5
3.	Gereja	4
4.	Pura	-
5.	Vihara	1
<b>Total</b>		<b>27</b>

*Sumber: Kecamatan Panjang Dalam Angka, 2020*

Tabel 10 menjelaskan bahwa pada Desa Panjang Selatan terdapat 27 jenis sarana peribadatan yang terdiri dari 17 mushola, 5 masjid, 4 gereja, dan 1 vihara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Panjang Selatan menganut agama islam.

#### **4.3 Perbedaan Lokasi Penelitian**

Desa Way Muli diketahui terdiri dari wilayah pertanian dan perikanan. Nelayan merupakan pekerjaan yang cukup mendominasi wilayah itu terlihat dari mata pencaharian Desa Way Muli di mana nelayan menempati posisi kedua terbanyak setelah petani dengan jumlah 247 KK. Sedangkan di Desa Panjang Selatan terdapat banyak perusahaan atau pabrik-pabrik besar sehingga banyak masyarakat Desa Panjang Selatan yang bekerja sebagai buruh. Adapun pekerjaan sebagai nelayan tidak sebanyak di Desa Way Muli yakni berkisar 205 jiwa.



## VI. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan terkait penelitian Perilaku Nelayan terhadap Bantuan Modal Perahu Wakaf Aksi Cepat Tanggap (Studi di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan dan Desa Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung) sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal perahu wakaf ACT bertujuan untuk membantu perekonomian nelayan kecil. Melalui bantuan yang diberikan maka harapannya para nelayan itu dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mencari nafkah sehingga dapat menghidupi keluarganya. Selain itu, juga memfasilitasi para masyarakat dermawan yang ingin mendapatkan pahala jariyah untuk dapat bersedekah melalui program wakaf yang dalam hal ini melalui bantuan modal perahu wakaf. Selanjutnya sebagai *emergency response* ketika terjadi bencana dikalangan nelayan dengan memberikan bantuan modal perahu.
- 2) Pemanfaatan bantuan modal perahu wakaf ACT yang telah dilakukan oleh para nelayan ialah dengan menggunakan perahu tersebut untuk melaut lebih jauh dan jam kerja yang lebih lama dari sebelumnya. Kebiasaan bangun pagi dengan aktivitas positif lainnya telah memicu munculnya rasa semangat atau tidak malas dalam mencari nafkah. Maka secara rasional tindakan mereka menunjukkan tindakan rasionalitas instrumental dengan memanfaatkan perahu dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan yakni produktivitas dan pendapatan meningkat.
- 3) Perawatan perahu oleh nelayan masih terus dilakukan. Perawatan yang dilakukan ketiga penerima manfaat kurang lebih sama yakni, membersihkan lumut, melakukan pengecatan ulang, dan mengecek kembali bagian perahu

serta mesin secara keseluruhan. Apabila terdapat bagian yang perlu diperbaiki maka akan mereka perbaiki. Perawatan yang sering dilakukan adalah membersihkan badan perahu dari lumut-lumut yang sering menempel. Sementara itu, untuk pengecatan perahu paling tidak dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Akan tetapi, dalam tempo waktu tersebut seringkali tidak dilakukan pengecatan oleh nelayan karena terkendala biaya.

- 4) Dampak bantuan perahu wakaf terhadap pendapatan keluarga nelayan penerima manfaat perahu diketahui belum begitu signifikan. Dampak bantuan perahu wakaf dibagi menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif.
  - a. Dampak positif
    - 1) Kebutuhan nelayan akan perahu terpenuhi
    - 2) Perahu bermanfaat untuk mencari nafkah
    - 3) Para nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan.
  - b. Dampak negatif
    - 1) Besar kecilnya perahu tidak begitu memengaruhi pendapatan nelayan
    - 2) Cara menangkap ikan masih sederhana/tradisional
    - 3) Penjualan dengan tengkulak kurang menguntungkan
    - 4) Pendapatan Tidak Sebanding dengan Kebutuhan
    - 5) Status Keluarga Belum Berubah Signifikan

## 6.2 Saran

- 1) Para nelayan sebaiknya mulai belajar keahlian lain diluar pekerjaannya sebagai nelayan agar pendapatan mereka dapat bertambah. Hal ini juga dapat dilakukan saat mereka tidak bisa melaut karena berbagai kendala sehingga mereka dapat terus memiliki pendapatan meskipun bukan dari hasil melaut.
- 2) Proses pendampingan kepada para penerima manfaat bantuan modal perahu wakaf ACT perlu ditingkatkan. Hal ini sebagai upaya untuk menunjang keterampilan keluarga nelayan sehingga keterampilan mereka dapat meningkat dan bisa lebih produktif dalam bekerja.
- 3) Pemberian bantuan sebaiknya ditunjang dengan perlengkapan menangkap ikan yang memadai seperti kebutuhan akan jaring/jala bagi nelayan sehingga

pendapatan mereka dapat meningkat. Selain itu, bantuan yang diberikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada perahu wakaf tetapi dapat juga dengan bantuan dalam bentuk jaring yang sangat dibutuhkan nelayan kecil.

- 4) Pemerintah daerah setempat di kedua lokasi dapat melakukan pembangunan atau menghidupkan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mempermudah para nelayan dalam melakukan penjualan hasil tangkapan. Pemerintah daerah setempat juga dapat memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi keluarga nelayan kecil untuk bisa meningkatkan kapasitas diri dan pendapatan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmel, J. E. 2018. *Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aksi Cepat Tanggap. 2019. Tentang ACT: Sejarah Aksi Cepat Tanggap. Diakses melalui <https://act.id/tentang/sejarah>, pada 7 November 2021.
- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Al-Qayyim. Kementerian Agama RI. Surakarta: Ziyad Books.
- Anwar, R., David, L., & Pali, C. 2016. Perbedaan Kebahagiaan pada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Desa Modayag Kecamatan Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal e-Biomedik*, 4(2).
- Arnawa, I. K., Purnama, I. B., & Arisena, G. M. K. 2016. Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 4(1), 47-55.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2020. Katalog: 4102002.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Kecamatan Panjang Dalam Angka 2020. Katalog: 1102001.1871030
- Bantuan (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bantuan>, pada 14 Februari 2022.
- BKKBN. 2011. Pemutakhiran Data Keluarga: Batasan dan Pengertian MDK. Diakses melalui <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, pada 7 November 2021.
- Cahyawan, W., & Machdum, S. V. 2019. Pendekatan Institutionalism dalam Keuangan Mikro dan Perannya terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan dan Solusi. *Sosio Informa*, 5(1), 64-80.

- Daud, C., Mantjoro, E., & Pontoh, O. 2018. Studi Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kema Tiga Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Akulturas*, 6(11), 859-870.
- Dimitra, S., & Yuliasuti, N. 2012. Potensi Kampung Nelayan Sebagai Modal Permukiman Berkelanjutan di Tambaklorok Kelurahan Tanjung Mas. *Jurnal Teknik PWK*, 1(1), 11-19.
- Ekafitri, W., Hasyim, A. I., & Soelaiman, A. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin Pada Sentra Penduduk Miskin di Provinsi Lampung. *JIAA*, 2(1)), 16-23.
- Fadhila, K. D. 2017. Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2(2), 16-23.
- Habibah., Rahmawati, N., & Syafitri, R. 2021. Sikap Nelayan Terhadap Bantuan Alat Tangkap di Desa Kelarik Utara Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 57-64.
- Hamdami, H., & Wulandari, K. 2016. Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. *E-SOSPOL*, 3(1), 62-67.
- Harefa, M. 2015. Masalah dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. *Kajian*, 20(4), 243- 366.
- Hendra. 2019. *Pengaruh Teknologi, Modal, Jam Kerja, dan Pengalaman Melaut terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Hermawati, I. 2017. Pengukuran Konstrak Kemiskinan di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 269-284.
- Ikhwanul, P. R., Kawung, E. J. R., & Waani, N. 2014. Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Jurnal Acta Diurna*, 3(4).
- Indara, S.R., Bempah, I., & Boekoesoe, Y. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA*, 2(1), 91-97.
- Indrianawati, E., & Soesatyo, Y. 2015. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Ekonomi Terhadap Tingkat Konsumsi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 3(1), 214-226.

- Infitah, N., Sukidin., & Hartanto, W. 2018. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 12(1), 103-109.
- Irfan, M., Rusyidi, B., & Lubis, Z. H. 2021. Analisis Strategi Kemitraan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Terhadap Keberhasilan Program. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 199-209.
- Khosyi'ah, S. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kiswanto, E. 2021. Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Jurnal PKS*, 20(2), 27-44.
- Lake, W. R. R., Hadi, S., & Sutriningsih, A. 2017. Hubungan Komponen Perilaku (Pengetahuan, Sikap, Tindakan) Merokok pada Mahasiswa. *Nursing News*, 2(3), 843-856.
- Lestari, Z. 2020. Jaringan Komunikasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana di Kota Palu. *KINESIK*, 7(3), 303-314.
- Listiyandra, K., Anna, Z., & Dhahiyat, Y. 2016. Kontribusi Wanita Nelayan dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan di Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 7(2), 80-90.
- Munandar, T. A., & Darmawan, D. 2020. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 5(2), 126-133.
- Mussadun., & Nurpratiwi, P. 2016. Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 27(1), 49-67.
- Najidah, N., & Lestari, H. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Natalia, Y., Suwasono, S., & Rusmiwari, S. 2012. Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dalam Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 40-48.

- Olanda, W. O. E., Bahtiar., & Upe, A. 2019. Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Mekar Sama Kecamatan Napabalandu Kabupaten Muna. *Neo Societal*, 4(1), 584-590.
- Perahu (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perahu>, pada 30 Desember 2021.
- Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. 2020. Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(1), 225-231.
- Pertiwi, P. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prakoso, J. 2013. *Peranan Tenaga Kerja, Modal, dan Teknologi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Pramesti, N. A. T., & Bendesa, I. K. G. 2018. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(9), 1887-1917.
- Prasiwi, P. A., & Harianto, S. 2018. Gaya Hidup Konsumtif Penerima Bantuan PKH (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. *Paradigma*, 6(1), 1-8.
- Pratama, Oki. 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses melalui <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> pada 29 Desember 2021.
- Putri, Atika. 2020. *Peran Aksi Cepat Tanggap dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Medan Belawan*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Rahmawati, Y. 2019. *Perspektif Badan Wakaf Indonesia Tentang Hak Sewa Benda Bergerak Sebagai Objek Wakaf*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rindawati, S. 2021. *Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan*. Media Sains Indonesia.

- Ritzer, G., dan Goodman, D.J. 2009. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53-66.
- Siregar, N. S. S. 2016. Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(1), 1-10.
- Sofianto, A. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Socio Konsepsia)*, 10(1), 14-31.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, A., Pratiknjo, M. H., & Sandiah, N. 2019. Kemiskinan Struktural dan Hubungan Patron Klien Nelayan di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Holistik*, 12(2), 1-20.
- Susilowati, S. P. 2006. *Peranan Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga (di Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Suryadi, A. M., & Sufi. 2019. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118-140.
- Tain, A. 2013. Faktor Dominan Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Motor Tempel di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. *Sosiohumaniora*, 15(1), 35-44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Utami, I. P., Rangga, K. K., Yanfika, H., & Mutolib, A. 2021. Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung. 5(1), 18-25.
- Yulianda, R., Maifizar, A., & Sopar. 2021. Budaya Kemiskinan Nelayan Kecil dan Buruh Nelayan. *Community*, 7(1), 102-109.